SEJARAH PERS ISLAM DI PALEMBANG (1965-1972): Studi atas Surat Kabar Mingguan "*Nusa Putera*"

Oleh:
Sarkowi
Staf Pengajar di Madrasah 'Aliyah Sanadiyah Palembang

Otoman
Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Abstract:

The press is an institution of mass communication that could serve the interests of the information society. Everyday the press provides an overview of a variety of events, providing a place for the community to issue a written opinion and pass on societal values from generation to generation. In the face of changes take place rapidly in communities clearly such information is very helpful. Weekly Newspaper "Mimbar Masjarakat" *and* "Nusa Putera" *edition of South Sumatra (1965 AD-1972 AD), is a testament to the history of the Islamic press in Palembang, where the existence and history are not so known to the public and public audiences in this city. Lunge and press struggle in build, develop, prosper, and educating the people of Palembang through its role is so urgent and complex. This constitutes an irony of history for Islam in the Indonesian press in general and in the city of Palembang in particular. This paper reveals the history and role and contribution of* "Mimbar Masjarakat" *and* "Nusa Putera" *Edition South Sumatra is very significant social change in Palembang.*

Keywords: *-Islamic Press, -Nusa Putera, -Palembang*

Pendahuluan

Pers dikenal sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara gambar, suara dan gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang ada. Pers dalam realitanya tidak muncul begitu saja, melainkan muncul melalui dinamika sejarah yang cukup panjang dan kompleks. Sejarah dan perkembangan zaman juga yang membawa pers kearah sempurna seperti saat ini, akan tetapi, tidak terlepas dari pengaruh dan faktor kelompok kepentingan atau organisasi, budaya, ideologi, politik, dan agama yang menjadikan pers

beragam dan bervariasi baik dalam fungsi maupun perannya mengikuti perkembangan zaman tersebut.

Di samping itu, pers merupakan lembaga komunikasi massa yang bisa melayani kepentingan informasi masyarakat. Setiap hari pers memberikan ulasan mengenai bermacam-macam kejadian, menyediakan tempat bagi masyarakat untuk mengeluarkan pendapat secara tertulis serta mewariskan nilai-nilai kemasyarakatan dari generasi ke generasi. Dalam menghadapi perubahan-perubahan yang berlangsung cepat dalam masyarakat jelas informasi semacam itu sangat bermanfaat.[1]

Sekilas tentang Sejarah Pers di Indonesia

Secara historis, pers di Indonesia telah terjadi dinamika perkembangan yang cukup panjang, yakni pers sebelum tahun 1900 M dan setelahnya. Pers murni pribumi dapat dikatakan belum ada sebelum 1900 M, sekalipun menggunakan bahasa pribumi, Melayu dan terutama Jawa. Bahkan, sampai tahun itu belum ada harian atau berkala yang berbahasa Sunda, dan masih harus menunggu beberapa tahun lagi.[2] Dengan demikian, banyak pengamat pers membagi sejarah pers Indonesia dalam beberapa era/masa.

Pertama, pers era kolonial (1744 M-1900 M). Dunia pers, di era kolonial dimulai pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Gustaaf Willem Baron van Imhoff. Surat kabar pertama pada 7 Agustus 1744 M, di Batavia Jakarta, yaitu *Bataviasche Nouvelles en Politique Raisonnementen*. Selama kurun waktu 1744 M-1854 M, surat kabar cenderung dimiliki oleh orang Eropa, berbahasa Belanda yang ditujukan bagi pembaca berbahasa Belanda berisi tentang kehidupan orang Eropa dan tidak terkait dengan kehidupan pribumi. Barulah pada kurun waktu sesudah itu mulai muncul surat kabar berbahasa Melayu, misalnya *Slompret Melajoe*.

Kedua, menurut pedekatan bibliografis yang dilakukan oleh Hoogerwerf (1990 M), perkembangan pers di Indonesia terjadi dalam periode 1856 M-1990 M. Pada masa ini, pers diwarnai dengan latar belakang kehidupan politik di Belanda dan munculnya pers Hindia Belanda yang didominasi oleh kaum liberal, yang berhasil menghapus Sistem Tanam Paksa dan Undang-Undang Agraria 1870 M. Parker (1982 M) mencatat

[1]Ana Nadya Abrar, *Pers Indonesia: Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992), h. 3.

[2]Pramudya Ananta Toer, *Sang Pemula* (Jakarta: Hasta Mitra, 1985), h. 23.

bahwa sejak 1850-an ada sebanyak 30 surat kabar yang diterbitkan di Hindia Belanda. Surat kabar tersebut bukan hanya berbahasa Belanda, tetapi juga berbahasa daerah, Melayu, dan Cina. Meskipun ada iklim yang memungkinkan terbitnya surat kabar, pemerintah kolonial pada dasarnya cenderung mencurigainya, sehingga muncul dan terbitnya berbagai peraturan yang mengekang kehidupan pers. Peraturan pertama pemerintah kolonial tentang pers adalah Peraturan Barang Cetakan (*Drukpers-reglement*) pada tahun 1856 M.[3]

Ketiga, era perjuangan kaum Nasionalis (1900 M –1942 M). Ketika pengaruh Politik Etis menumbuhkan pandangan-pandangan dan pemikiran baru mengenai perimbangan-perimbangan kolonial, muncul kesadaran politik baru bahwa hubungan penjajah dengan terjajah tidaklah abadi, dan kelak masyarakat Indonesia akan sanggup berdiri sendiri. Elit Indonesia yang baru tumbuh pun memperhatikan pandangan baru itu. Tentu pers telah memainkan suatu peran penting dalam mengembangkan nasionalisme dan pembentukan identitas nasional sebelum deklarasi kemerdekaan dan revolusi fisik, tetapi secara hati-hati harus dibedakan antara pers yang dikuasai Belanda di pertengahan sampai jauh dalam abad ke-19 dan pers bumiputera dari permulaan tahun 1900 M.[4]

Pada paruh abad ke-19, surat kabar dan jurnal-jurnal yang diterbitkan dalam bahasa Indonesia, khususnya Melayu, mulai muncul di kota-kota Hindia Belanda. Memang, dalam periode ini terbitan publikasi-publikasi ini masih dalam jumlah kecil dan hanya sampai pada pembaca yang terbatas. Namun, usaha ini telah memberikan sarana informasi sekitar seluk-beluk Hindia Belanda dan dunia yang lebih luas; dan memiliki peran yang besar dalam memperkenalkan masyarakat pribumi dengan ide-ide modernitas.

Meskipun demikian, harus dibedakan antara pers berbahasa Melayu atau pers berbahasa daerah dan pers nasional. Kriteria yang digunakan dalam pembedaan ini adalah kepemilikan usaha dan redakturnya. Pers berbahasa Melayu atau berbahsa daerah tidak selamanya identik dengan pers nasional karena dikelola oleh orang-orang

[3]Ayundayani Rosadi, "Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia Sampai Kemerdekaan," artikel diakses pada 24 Desember 2013 pkul 19: 24 wib. dari *http://ayundayanirosadi.blogspot.com/ 2012/10 /perkembangan-sejarah-pers-di-indonesia.*

[4]Nor Huda, "Wacana "Islamisme dan Komunisme: Melacak Genealogi Intelektual Hadji Mohammad Misbach (1876-1926)", *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012), h. 98.

Belanda, Cina atau gabungan dari keduanya ditambah dengan bumiputera. Sementara itu, pers nasioanal merupakan surat kabar yang dibiayai dan dikelola oleh bangsa Indonesia sendiri. Dalam perkataan lain, pers nasional merupakan surat kabar yang murni diusahakan dan dikelola oleh bangsa pribumi. Pers nasional yang juga disebut dengan *vernacular press*, merupakan pencerminan dari aspirasi dan cita-cita bangsa dalam arti yang seluas-luasnya.[5]

Pelopor pers nasional ialah *Medan Prijaji* (waktu itu terbit sebagai mingguan). Sesuai dengan namanya, *Medan Prijaji* merupakan suara golongan priyai, lingkungan pembaca yang ingin dicapai ialah "Anak Hindia". Pendiri dan pemimpin redaksinya adalah R. M. Tirtoadiseorjo (1880 M-1918 M), terbit pada tahun 1907 M dan sejak 1910 M sebagai harian. R. M. Tirtoadisoerjo dianggap sebagai Bapak Pers Nasional. Dalam pandangan Marco Kartodikromo, R. M. Tirtoadisoerjo-lah orang Indonesia pertama yang bergerak dalam dunia kewartawanan *(journalisten)* dan menuntun bangsa Indonesia ke arah kemajuan. Marco memandang Tirtoadisoerjo mempunyai jasa yang banyak untuk menjunjung derajat bangsa Indonesia.[6]

Tirtoadisoerjo sendiri, secara genealogis intelektual, mendapat pengaruh yang cukup kuat dari Karel Wijbrands, seorang jurnalis di *De Sumatra Post* (Medan) dan kemudian *Nieuws van den Dag voor Nederlanch-Indie* (Batavia). Pertemuan Tirtoadisoerjo dengan Wijbrands adalah karena koran *Pemberita Betawi*, yang dikelola oleh Tirto, dicetak sedapur dengan *Nieuws van den Dag*. Meskipun hanya bertemu selama dua bulan, Wijbrands telah mengajari Tirtoadiseorjo cara mengelola penerbitan yang baik dan cara dapat memiliki dan memimpin penerbitan sendiri. Wijbrands juga menyarankan agar Tirto belajar tentang hukum untuk mengetahui batas-batas kekuasaan Hindia-Belanda, hak dan kewajibanya. Mempelajari agama Islam juga dianjurkannya untuk mengenal bangsa Indonesia dengan baik, karena menurutnya agama Islam merupakan agama yang baik dalam peraturan dan disiplin, kemudian juga karena mayoritas orang Indonesia adalah muslim.[7]

Pasca terbitnya *Medan Priaji* sebagai pers nasional, sejak tahun 1913 M mulai muncul dan berkembang model pers yang berafiliasi pada aliran politik atau organisasi

[5]*Ibid.*, h. 99.

[6]Tim Penulis Kompas, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), h. 77.

[7]Lihat Pramoedya Ananta Toer, *Sang Pemula*, h. 45.

tertentu. Namun, jauh sebelumnya, sebenarnya pers sudah menjadi perhatian organisasi pertama yang berdiri yaitu Boedi Oetomo. Sejak kelahirannya, organisasi pertama ini memperhatikan pentingnya penerbitan dan surat kabar sebagai penyambung suara organisasi. Karena itu, pers menjadi salah satu corong dari aliran politik dan organisasi kebangsaan yang ada ketika itu.[8]

Setelah pers mulai berkembang dan berafiliasi pada golongan dan organisasi tertentu pasca *Medan Prijaji*, Sarekat Islam menerbitkan pers *Oetoesan Hindia*, yang lahir setelah Sarekat Islam mengadakan kongres pertama di Surabaya pada 26 Juli 1913 di bawah pimpinan Tjokroaminoto, Sosrobroto serta Tirtodanudjo. Tirtodanudjo merupakan penulis yang tajam menarik perhatian umum, demikian juga karangan seorang yang bernama Samsi dari Semarang. Keduanya merupakan pemegang rekor delik pers dan sering kali berurusan dengan pihak pengadilan. Tjokroaminoto sendiri mengimbangi dengan tulisan-tulisan yang tinggi mutunya dengan nada tenang, juga bila dia menulis untuk menangkis serangan-serangan yang ditujuakan kepadanya.[9]

Surat kabar Sarekat Islam lainnya ialah *Sinar Djawa* di Semarang, *Pantjaran Warta* di Betawi dan *Saroetomo* di Surakarta. Selama tiga belas tahun, hampir semua surat kabar dari Sarekat Islam isinya mencerminkan dunia pergerakan politik, ekonomi dan perburuhan, khususnya yang dipimpin oleh Central Sarekat Islam. Karangan para pemimpin Indonesia lainnya muncul dan mengisi surat kabar itu serta merupakan perhatian pembaca. Singkatan nama-nama mereka O.S.Tj. (Oemar Said Tjokroaminoto), A. M. (Abdul Muis), H.A.S. (Haji Agus Salim), A.H.W (Wignjadisastra) dan Surjopranoto silih berganti mengisi surat kabar itu, yang pengaruhnya sering tampak di surat kabr yang terbit di kepulauan lain.[10]

Dilihat dari aspek pers yang berlabel Islam, pada tahun 1911 M ternyata di Minangkabau Sumatera Barat telah terbit majalah Islam pertama, yaitu: *Al-Munir* pada tanggal 1 April 1911. Pelopor dari majalah ini adalah Haji Abdullah Ahmad, murid dari Syekh Thaher Djalaluddin sewaktu mereka di Mekkah. Semua penerbit dan pelopor

[8]Tim Penulis Kompas, *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, h. 84.
[9]*Ibid*. h. 85.
[10]*Ibid.*

majalah-majalah Islam tersebut dikenal sebagai para modernis agama Islam khususnya untuk periode peralihan abad ini.[11]

Dari segi isinya, juga terlihat adanya kesinambungan pada majalah-majalah tersebut. Topik-topik yang disajikan melalui berita-berita, opini-opini, dan tulisan-tulisan dari para kolomnis lebih disadarkan kepada unsur-unsur pembaruan. Topik-topik yang penting dan menarik sering disadur ulang dalam penerbitan yang baru. Tulisan-tulisan yang biasa disadur sebagian besar berisi analisis sebab-sebab kemunduran agama dan dunia Islam yang akibatnya ranah sosial dan ekonomi didominasi oleh Barat. Seperti majalah *al-Imam* di Singapura, *al-Munir* pada edisi pertamanya, juga menyadur sebuah makalah yang diterbitkan oleh majalah *al-Urwatul Wutsqa* yang berjudul *"Wazakkir fa innazzikra tanfaul mukminin"*. Majalah *al-Munir* juga menyadur tulisan-tulisan dari majalah *Al-Manar*, di antaranya, tentang biografi Nabi Muhammad yang berjuang dengan penderitaan dan cobaan-cobaan yang berat.[12]

Pada tahun 1916 M, majalah *Al-Munir* tidak dapat terbit lagi disebabkan kekurangan dana dan kurangnya pengalaman para ulama yang mengelolahnya. Hal ini dapat dilihat dari nama-nama manajemennya yang sebagian besar adalah ulama-ulama yang tidak punya ambisi sebagai tokoh pergerakan perjuangan dalam bidang pers. Apalagi dalam masa itu penerbitan pers bukan merupakan usaha profesional.[13]

Di zaman Orde Baru (1966 M-1989 M) di Indonesia terjadi pasang surut pada dunia pers yang ditandai dengan naik dan turunnya kuantitas dari angka surat kabar yang terbit.[14] Berdasarkan pengamatan para ahli pers dan wartawan bahwa yang menjadi tolak ukur *performance* pers Orde Baru adalah peristiwa *Malari* 1974 M,[15] perbedaan peningkatan jumlah surat kabar yang terbit sangat kontras terjadi antara sebelum Malari dan sesudah Malari.[16]

Surat kabar yang sering terbit pada waktu itu adalah Koran *Harian Rakjat* (koran PKI), *Pedoman* (pro-PSI), *Suluh Indonesia* (koran PNI) dan *Abadi* (pro-Masyumi), semuanya terbit di Jakarta. Selain keempat harian tersebut, di Jakarta

[11]Yuliandre Darwis, *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2013), h. 78.

[12]*Ibid*., h. 80.

[13]*Ibid.*

[14]Akhmad Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia 1966-1974* (Yogyakarta: LKIS, 1995), h. 21.

[15]Malari adalah sebuah singkatan dari peristiwa *Malapetaka 15 Januari* 1974, akibat penolakan mahasiswa terhadap datangnya Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka ke Jakarta yang kemudian terjadi bentrok antara aparat keamanan dan mahasiswa.

[16]Akhmad Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, h. 1.

tercatat harian *Merdeka*, *Pemandangan*, *Bintang Timur*, *Duta Masjarakat*, *Keng Po*, *Sin Po*, dan majalah-majalah seperti *Siasat*, *Mimbar Indonesia, Panji masyarakat* serta *Star Weekly* dan lain sebagainya.[17]

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa Peristiwa Malari adalah "batas air" (*watershed*), meminjam istilah David T. Hill (1987 M). Dalam *performance* pers di masa Orde Baru, pers pra-Malari adalah pers yang idealis, yang menyuarakan hati nurani dan aspirasi rakyat, pers yang berani dan kritis melakukan kontrol sosial. Dengan kata lain, pers pra-Malari adalah pers yang bebas, merdeka dan tidak memihak.[18] Sebaliknya, pers pasca-Malari adalah pers yang tidak atau kurang idealis, cenderung mewakili kepentingan penguasa, pemerintah atau negara serta jarang, malah tidak pernah melakukan kontrol sosial secara kritis tegas dan berani. Singkat kata, pers pasca-Malari adalah pers yang tidak bebas dan memiliki kemerdekaan yang terbatas.[19]

Pergeseran fungsi, makna dan peran pers pada masyarakat secara umum merupakan kasus yang seharusnya menjadi objek kajian bagi seluruh tokoh masyarakat. Dalam hal ini yang penting diketahui adalah bahwa di antara beberapa banyak surat kabar atau koran sebagian ada surat kabar dari pers Islam pada masa itu, seperti: *Duta Masjarakat*, *Harian Abadi*, *Panji Masyarakat*, dan *Mimbar Masjarakat* yang merupakan pers Islam yang juga berperan penting dalam kontrol sosial dan institusi sosial.[20]

Meskipun demikian, ironisnya di negara yang mayoritas Muslim ini justru yang lebih mendominasi media pers adalah kaum non-Muslim. Akan tetapi, sebagian pers Islam yang masih tetap eksis dan bertahan pada masa Orde Baru, di antaranya, adalah *Duta Masjarakat* yang didukung NU (Nahdhatul Ulama) dan *Panji Masjarakat* yang didukung oleh Masyumi dan *Mimbar Masjarakat* didukung oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang kemudian dilanjutkan oleh *Nusa Putera*.[21]

Dalam skala nasional, sebagian pers Islam tersebut merupakan nama-nama pers yang berada di ibukota negara. Pada ruang lingkup daerah, pers-pers tersebut, seperti:

---

[17]Tim Penulis PWI Cabang NTT., *Sekilas Sejarah Pers Indonesia*, dalam http: //pwintt.blogspot.com /2013/03/ *sekilas-sejarah-pers-indonesia*-2.html, diakses pada 31 Mei 2013 pukul 21:09 wib

[18]Akhmad Zaini Abar. *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*, h. 4.

[19]*Ibid.*, h. 5.

[20]Alex Sobur, "Peran Pers Islam dalam Upaya mendorong Proses Demokratisasi di Indonesia", dalam *Majalah Mediator*, Vol. 5, No. 2, 2004, h. 246.

[21]*Ibid.*

Duta Masjarakat dan *Panji Masjarakat* merupakan cabang dari pers pusat (nasional). Karena itu, jika pers cabang pada daerah bagian dari pers nasional, pers tersebut sebagai edisi dari daerah masing-masing, seperti *Duta Masjarakat* cabang Sumatera Selatan berarti *Duta Masjarakat* edisi Sumatera Selatan.[22]

Berkaitan dengan permasalahan pers nasional dan pers daerah, maka perlu diperjelas pembagiannya. Menurut Ashadi Siregar -salah seorang pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gajah Mada- menyebut pers daerah itu berkaitan dengan lingkupnya: nasional, regional, atau lokal. Nasional melingkupi seluruh wilayah negara. Regional mencakup sebagian wilayah nasional dan bersifat antar daerah, sedangkan lokal mencakup satu kota atau daerah terbatas.[23]

Profil Surat Kabar Mingguan *Mimbar Masjarakat* Edisi Sumatera Selatan

Sebagaimana diketahui, bahwa Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua dan menyimpan banyak sejarah dari berbagai aspek, baik sosial, ekonomi, politik, serta budaya. Pada masa Kolonial Belanda hingga pra-Orde Baru (1900 M-1965 M) di Kota Palembang khususnya, sudah ada banyak media pers yang terbit sebagai pers lokal, di antaranya *Perjta Selatan*, *Duta Masyarakat* (yang sebelum Orde Baru bernama *Batang Hari Sembilan*), *Fikiran Rakyat* corong PKI, *Obor Rakyat*, *Panji Revolusi*, dan *Mimbar Masjarakat* (yang selanjutnya menjadi *Nusa Putera*).[24]

Dari beberapa pers tersebut, ada beberapa pers yang berbasis pers Islam, di antaranya ialah Surat Kabar *Batang Hari Sembilan*, *Panji Masyarakat*, dan *Mimbar Masjarakat* yang dilanjutkan *Nusa Putera* edisi Sumsel. Pers tersebut berjuang mengatasi dan mengontrol masalah-masalah sosial yang timbul dalam masyarakat Kota Palembang akibat pergerakan PKI pada rezim Orde Lama sebelum meletus pemberontakan PKI 1965 M.[25] Pada masa itu, satu-satunya pers Islam yang berani

[22]*Wawancara* dengan bapak Bastari Suan (Tokoh masyarakat dan Budayawan Kota Palembang), pada 26 Mei 2014.

[23]Lihat Ana Nadhya Abrar, *Pers Indonesia: Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa*, h. 109. Dalam kutipannya tentang "Pers Daerah: Semakin Berkibar, semakin menyimpan masalah" yang pernah dimuat dalam Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, 2 Juli 1991.

[24]*Wawancara* dengan bapak H. Kurnati Abdullah (Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 17 Januari 2014.

[25]*Ibid.*

melawan PKI dan Orde Lama adalah Surat Kabar Mingguan *Mimbar Masjarakat* milik tokoh-tokoh HMI Palembang yang kemudian dilanjutkan *Nusa Putera*. [26]

Surat Kabar Mingguan *Mimbar Masjarakat* yang berdiri pada 1 Februari 1965 M sebelum Orde Baru, didirikan oleh tokoh-tokoh HMI Palembang bertujuan untuk menumpas PKI dan memperjuangkan hak-hak masyarakat Kota Palembang dengan melakukan tugas dan fungsinya sebagaimana pers seharusnya. Namun, setelah memasuki era Orde Baru pada tahun 1971 M, keluar Peraturan Pemerintah tentang aturan-aturan pers dan mengharuskan setiap pers untuk berafiliasi kepada partai politik. Sebab itulah nama dan pengelola pers *Mimbar Masjarakat* berubah menjadi *Nusa Putera* yang didukung oleh PSII.[27]

Berdirinya *Mimbar Masjarakat* adalah atas hasil rapat Badan Komisi Nasional HMI Sumatera Selatan pada Januari 1965 M di Balai Pertemuan Sekanak Palembang, barulah satu bulan kemudian *Mimbar Masjarakat* diterbitkan.[28] Pencetus ide dan inisiatif berdirinya *Mimbar Masjarakat* adalah tokoh-tokoh senior HMI Cabang Palembang yaitu, Marzuki Yahya, Ibnu Hadjar, B. A, dan A. Karim Ani, yang kemudian didukung hangat oleh angota-anggota HMI lainnya, terutama anggota lembaga otonom dari HMI, yaitu Lembaga Pers Mahasiswa Islam (LAPMI).[29]

Bersamaan dengan diresmikannya SKM. *Mimbar Masjarakat* setelah mendapat Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP) dari pemerintah, maka ketika itu *Mimbar Masjarakat* membuka sekretariat dan kantornya redaksinya di Pasar Lingkis lantai 2, Jalan Jendral Sudirman (Pasar Cinde Palembang saat ini). Semua karyamawan dan wartawan/jurnalisnya merupakan orang-orang yang direkrut dari anggota HMI itu sendiri, sehingga dalam proses pencarian berita dan penerbitannya pertama SKM. *Mimbar Masjarakat* sempat kurang efektif, karena belum ada pengalaman dan keahlian dibidang jurnalis. Di antara wartawan dari anggota HMI ketika itu ialah, Kurnati Abdullah dan Zulkifli Pako yang sama sekali belum ada bekal dalam keilmuan jurnalis.[30]

---

[26]Kurnati Abdullah, *45 Tahun Mengabdi Kepada Pers 1965- 2010: Sebuah Autobiografi* (Palembang: Rachmat Abadi, 2010), h. 11.

[27]*Ibid*., h. 12 -16.

[28]*Wawancara* dengan bapak H. Kurnati Abdullah (Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 11 Juli 2014.

[29]*Ibid.*

[30]*Ibid.*

Menjadi wartawan ketika itu memang sangat sulit, karena wartawan dituntut harus bisa menguasai segala hal yang berkaitan dengan kegiatan penerbitan pada perusahaannya. Selain sebagai pencari berita yang merupakan tugas pokoknya, wartawan juga harus mencari iklan dan menjadi korektor atau editor berita yang didapatnya. Bahkan wartawan juga harus menguasai semua masalah, seperti politik, ekonomi, kriminal, olahraga, hiburan, dan seni budaya.

Berbeda dengan saat ini, semua pekerjaan wartawan, penerbitan, dan percetakan sudah ada bagiannya masing-masing, sehingga tidak memberi tugas ganda kepada seorang wartawan, wartawan hanya bertugas sekedar mencari berita dan itu pun telah terbagi atas topik berita masing-masing. Pengelolaan berita dikerjakan melalui komputer dan percetakan berita di kelola dengan mesin automatis dan modern. Pada saat itu, berita dikelola dengan menggunakan mesin ketik manual dan juga alat percetakan manual.[31]

Kendati demikian, SKM. *Mimbar Masjarakat* yang memiliki motto "Berjuang untuk ummat Islam" terus berusaha berjuang menerbitkan korannya di tengah arus pergolakan Orde Lama dan himpitan PKI. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, semangat juang tidak pernah menurun karena *Mimbar Masjarakat* tidak berjuang sendiri. Saat itu juga terbit beberapa koran mingguan yang seideologi berjuang membela rakyat, yaitu *Batanghari Sembilan* (milik tokoh-tokoh Nahdhatul Ulama), *Obor Rakyat* dan *Panji Revolusi*.[32]

SKM. *Mimbar Masjarakat* yang kantor redaksinya berada di Pasar Lingkis lantai 2 (Pasar Cinde Palembang sekarang), tidak memiliki alat percetakan sendiri seperti koran-koran modern saat ini. Pada masa itu, di Palembang khususnya hanya ada dua perusahaan percetakan dan penerbitan saja, yaitu Percetakan Rambang di Jalan Mayor Ruslan dan Percetakan N.V Meru di 7 Ulu, Palembang. Oleh karena itu, hampir semua koran mingguan yang terbit pada era tahun 1960 hingga 1970-an dicetak di kedua percetakan itu, termasuk salah satunya SKM. *Mimbar Masjarakat*.

Dalam kurun waktu satu minggu sekali, proses penerbitan SKM. *Mimbar Masjarakat* tidaklah sederhana. Setelah berita-berita yang diliput oleh para wartawan, berita tersebut harus dikoreksi dan diedit tersendiri di kantor redaksinya sebagai tahap

[31] *Wawancara* dengan Bapak Ahmad Soleh ((Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 12 Agustus 2014.
[32] *Ibid.*

awal. Kemudian, berita tersebut dikirim oleh karyawan atau wartawan itu sendiri ke Percetakan Rambang di Jalan Mayor Ruslan untuk diproses lebih lanjut. Namun, sebelum berita tersebut dicetak ada satu tahapan lagi yang harus dilakukan, yaitu mengkoreksi ulang berita-berita yang ditulis.[33]

Pada proses tersebut, terkadang seorang wartawan yang membawa berita ke percetakan mau tidak mau harus rela menjadi korektor kembali. Pengeditan sebuah berita di percetakan harus dipres dahulu melalui huruf-huruf timah. Melalui kertas yang dipres tadi beritanya disunting. Penyuntingan pertama tidak menjamin berita itu benar, karena bisa saja pada editan pertama ada salah ketik dan lain sebagainya. Hal demikian harus dilakukan karena semua isi berita di luar tanggung jawab percetakan. Percetakan hanya bertugas mencetak dan menerbitkan saja. Semua koran yang dicetak di Percetakan Rambang dicetak secara manual, dan hampir setiap koran hanya terbit empat halaman, itupun mingguan.[34]

Setiap hari Sabtu pagi koran *Mimbar Masjarakat* terbit dari Percetakan Rambang, kemudian dibawa ke kantor redaksinya di Pasar Lingkis lantai II untuk dilipat dan dikirim kepada pelanggan. Untuk pelanggan di luar kota koran dikirim melalui perangko berlangganan Kantor Pos Palembang, dan yang di seputar Kota Palembang diantar langsung ke rumah-rumah atau kantor pelanggan oleh karyawan atau wartawan *Mimbar Masjarakat* tersebut.

Pada tahun-tahun ini, yakni era Orde Lama dan PKI menjelang Orde Baru, masyarakat Kota Palembang memang sudah ada minat baca, tetapi belum begitu banyak minat membeli. Apalagi saat itu tidak banyak koran yang beredar setiap hari kalau pun ada ialah koran-koran terbitan Jakarta. Palembang dibelah Sungai Musi, Ilir dan Ulu. Pusat bagian kota adalah bagian Ilir di mana banyak pusat kegiatan pers berada di sini. Oleh karena itu, orang Ulu harus pergi ke Ilir atau ke kota untuk mendapatkan koran bagi yang tidak berlangganan, karena waktu itu tidak ada penjual koran seperti saat ini.[35]

Kondisi itulah yang menjadi salah satu tantangan bagi SKM. *Mimbar Masjarakat* dari segi pemasaran. Namun, dengan SDM dan modal yang ada, *Mimbar*

---

[33]Kurnati Abdullah, *45 Tahun Mengabdi Kepada Pers 1965- 2010: Sebuah Autobiografi.*, h. 11-12.

[34]*Ibid.*

[35]Isnawijayani, "Media Lokal Merubah Kehidupan Masyarakat (Kajian di Kota Palembang)", dikutip dalam *http://isnawijayani.wordpress.com/2013/05/14/media-lokal-merubah-kehidupan-masyarakat/*, pada 19 Agustus 2014 pukul 13.08 Wib

Masjarakat bisa tetap bertahan dan berlangsung selama beberapa bulan. Memang tidak dipungkiri, sebelum dan sesudah meletusnya G-30-S/PKI antara tahun 1965 – 1970-an tidak ada koran yang dapat bertahan lama dengan situasi dan kondisi yang ada, baik dari internal perusahaan maupun gangguan eksternalnya.

Sebagaimana organisasi dan perusahaan pada umumnya, penerbit SKM. *Mimbar Masjarakat* yang fungsinya sebagai media massa, lembaga penyalur informasi, aspirasi dan opini, juga memiliki struktur kepengurusannya. Sususnan Struktur Kepengurusan SKM. *Mimbar Masjarakat* sebagai berikut:[36]

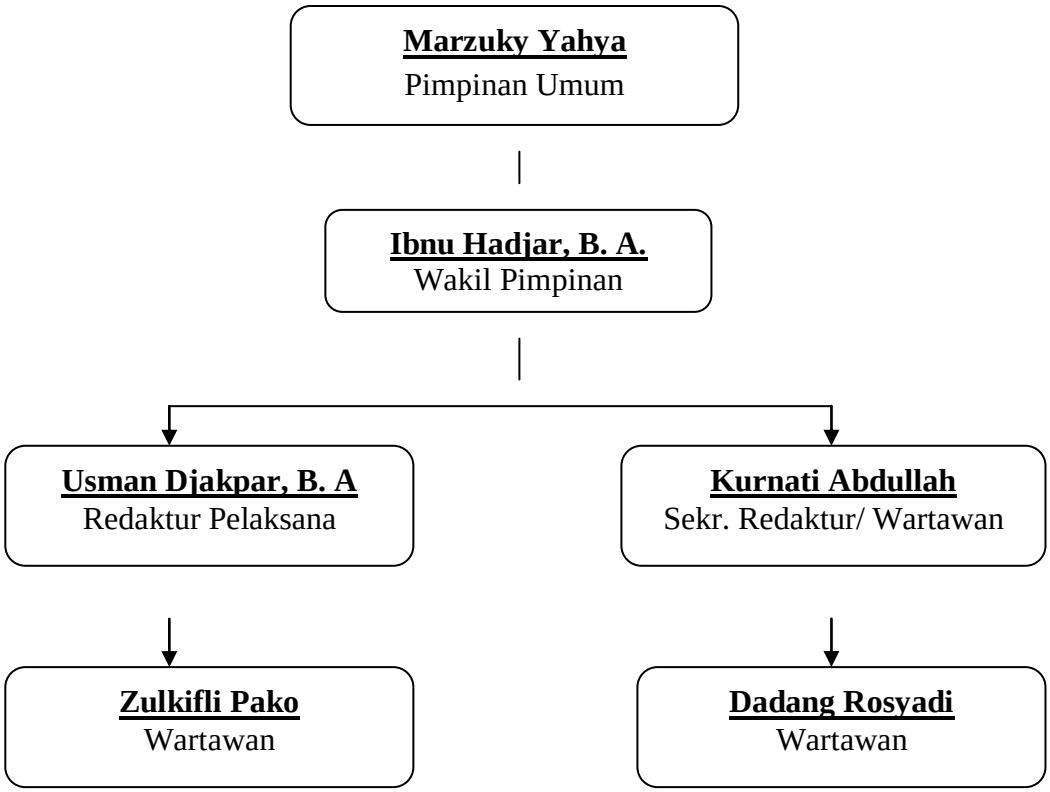

Gambar bagan di atas merupakan susunan kepengurusan SKM. *Mimbar Masjarakat* secara administratif saja, sedangkan sesungguhnya selain Pimpinan Umum semua bergerak juga sebagai wartawan, editor/ korektor berita dan bahkan sebagai penjual koran-koran tersebut. Hal demikian sudah menjadi kesadaran dan kewajiban bagi karyawan *Mimbar Masjarakat*, karena keterbatasan SDM dan modal dari perusahaan.

[36]*Wawancara* dengan Bapak H. Kurnati Abdullah (Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 11 Juli 2014.

Surat Kabar Mingguan *Mimbar Masjarakat* Berubah menjadi *Nusa Putera*

Selama beberapa bulan sejak berdirinya, SKM. *Mimbar Masjarakat* kelihatan tidak ada masalah, artinya semua aktivitas dan rutinitas penerbitan dan percetakan berjalan dengan lancar tanpa tekanan dan hambatan suatu apa pun. Ketika itu, banyak pihak yang mengakui bahwa *Mimbar Masjarakat* adalah satu-satunya koran yang paling berani melawan PKI dan Orde Lama sebelum meletusnya pemberontakan PKI. Sebagaimana diakui oleh tokoh pers saat itu, Tengku Somba Lubis dan Ketua DPRD Sumsel Drs. H. A. Zaidan Djauhari. Bahkan, mereka mengatakan bahwa *Mimbar Masjarakat* merupakan rival bagi kelompok komunis dan Orde Lama.[37]

Sebagai media massa yang secara terang-terangan melawan Orde Lama dan PKI, tentu saja *Mimbar Masjarakat* harus siap pula menghadapi risiko berupa tekanan-tekanan dari rivalnya. Selama *Mimbar Masjarakat* terus berjuang melawan Orde Lama dan PKI tersebut, ada tiga tekanan yang mereka berikan.

Tekanan pertama yang dialami oleh *Mimbar Masjarakat* saat pra G-30-S/PKI adalah dari Central Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) *onderbouw*-nya PKI yang sangat anti dengan HMI, sedangkan *Mimbar Masjarakat* merupakan media HMI yang anti-PKI dan bersebrangan dengan GMNI. Bahkan, menjelang meletusnya G-30-S/PKI sudah ada wacana dari CGMI dan GMNI di Balai Pertemuan Sekanak Palembang untuk membubarkan HMI, tetapi gagal karena adanya solidaritas mahasiswa Islam dari beberapa organisasi kemahasiswaan, seperti: Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Serikat Mahasiswa Muslim Indonesia (SEMMI), dan Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII). Sebab lainnya adalah meletusnya pemberontakan PKI.[38]

Kemudian, tekanan yang kedua saat sesudah meletusnya G-30-S/PKI pada 30 September 1965, yaitu tentang pemberitaan *Mimbar Masjarakat* yang memberitakan keterlibatan Jaksa Tinggi Sumatera Selatan, Sugiarso, dalam gerakan tersebut, hingga tertangkap. Ketika itu juga, datang ancaman ke Kantor *Mimbar Masjarakat* di Pasar Cinde Palembang dari antek-antek PKI, yang hendak menghabisi karyawan *Mimbar Masjarakat*, sehingga semua karyawan dan wartawan melarikan diri dan bersembunyi di tempat lain untuk menyelamatkan diri. Tekanan ini berhasil dihindari oleh semua

[37]Kurnati Abdullah, *45 Tahun Mengabdi Kepada Pers 1965- 2010: Sebuah Autobiografi.,* h. 11-12.
[38]*Ibid.*

karyawan *Mimbar Masjarakat* dan tidak ada satu orang pun yang menjadi korban kekerasan PKI.[39]

Setelah meletusnya Pemberontakan PKI 30 September 1965 M, awal tahun 1966 M mahasiswa sedang bergolak menumpas PKI dan pendukung-pendukungnya, demikian pula di Sumatera Selatan. Semua gerakan mahasiswa yang anti-PKI dan Orde Lama turut andil dan berpartisipasi dalam menumpas PKI yang telah melakukan pemberontakan di negara ini. Kegiatan rutin HMI terus berjalan sembari berjuang melawan PKI dan antek-anteknya, sementara koran tetap terbit.[40]

Dengan pergolakan mahasiswa 1966 M tersebut *Mimbar Masjarakat* lebih dekat dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) Sumsel dan Kesatuan Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP Gestapu), sehingga pemberitaan SKM. *Mimbar Masjarakat* ketika itu lebih banyak bersumber dari Presidium KAMI Sumsel dan KAP Gestapu Sumsel. Salah satu penerbitan SKM. *Mimbar Masjarakat* edisi Maret 1966 memuat artikel berjudul "PNI ASU tidak kutuk GESTAPU" dengan narasumber Ir. K. Y. Wasil sebagai Ketua KAP Gestapu Sumsel. Ternyata, berita ini membuat marah anak-anak PNI dan GMNI. Rupanaya judul berita tersebut bocor keluar sebelum koran naik cetak. Berita ini bocor karena *headlines* koran *Mimbar Masjarakat* telah dibaca oleh karyawan *Suluh Indonesia* yang merupakan koran PNI ketika mencetak di Percetakan Rambang. Usai koran *Mimbar Masjarakat* dicetak kemudian akan dibawa oleh Usman Djakpar dan Kurnati Abdullah ke Kantor Redaksi di Pasar Cinde dengan becak. Namun, ketika becak baru keluar dari percetakan, puluhan anggota GMNI Sumsel menyerbu dan merampas koran tersebut dan melarikan becaknya.[41]

Tidak berhenti dengan merampas koran saja, bahkan rombongan GMNI tersebut mengejar dua orang karyawan *Mimbar Masjarakat* yang membawa korannya dan membakar koran tersebut di halaman percetakan. Usman Djakpar dan Kurnati Abdullah saat dikejar anak-anak GMNI berlari dan menyelamatkan diri masuk ke dalam Percetakan Rambang. Di sini, mereka menelpon Kapendam IV saat itu Kapten Drs. Chaidir Basri dan memberitahukan masalah meraka. Beliau datang dengan

[39]*Ibid.*, h. 13.
[40]*Ibid.*, h. 14.
[41]*Wawancara* dengan Bapak H. Kurnati Abdullah (Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 11 Juli 2014.

membawa senjata *stand gun* dan mengancam anak-anak GMNI agar tidak masuk ke Percetakan Rambang.[42]

Ketika situasi sudah kondusif dan tenang dari serangan GMNI, Usman Djakpar dan Kurnati Abdullah baru mendapat informasi bahwa PNI dan anak-anak GMNI tersinggung karena judulnya pakai kata "ASU" yang ditafsirkan dalam Bahasa Jawa berarti "anjing". Padahal ASU merupakan singkatan dari Ali Sastroamijoyo-Surachman yang saat itu menjadi Ketua Umum dan Sekjen DPP PNI. Peta politik saat itu memang sangat memihak kepada golongan yang kuat dan mengintimidasi golongan yang lemah agar tidak mampu bangkit untuk berjuang. Itulah alasan berita tersebut diterbitkan untuk membuka kesadaran masyarakat akan hal yang tidak benar dan merugikan banyak orang.[43]

Terjadi kebijakan pemerintah menyangkut media massa, yang sebelum meletus G-30-S/PKI media massa corong-corong PKI berkuasa sekali baik di tingkat nasional maupun lokal. Kebijakan itu mengharuskan semua media massa yang terbit harus berafiliasi ke partai politik di tingkat nasional. Contohnya, kalau NU mempunyai *Duta Masyarakat* di nasional, maka di daerah merupakan edisi lokalnya dan bernama *Duta Masyarakat* edisi Sumsel. Sementara itu, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) di Pusat mempunyai koran *Nusa Putera*, maka di Sumatera Selatan bernama *Nusa Putera* edisi Sumatera Selatan (selanjutnya disingkat edisi Sumsel).[44]

Keluarnya kebijakan pemerintah tersebut adalah untuk menertibkan dan mengatur semua media massa menghadapi Pemilu yang akan berlangsung pada 1970 M. Dengan kebijakan tersebut dan demi keberlangsungan hidup SKM. *Mimbar Masjarakat* pasca peristiwa pembakaran koran, maka *Mimbar Masjarakat* mengganti nama menjadi *Nusa Putera* edisi Sumsel yang berafiliasi ke partai PSII pada tahun 1967 M. Hal ini mengingat bahwa HMI bukan merupakan sebuah partai politik, tetapi hanya sebuah organisasi massa. *Nusa Putera* dipilih *Mimbar Masjarakat* sebagai afiliasi karena memiliki keselarasan ideologi dan basis sebagai partai Islam yang membela ummat.[45]

---

[42]*Ibid.*

[43]*Ibid.*

[44]Kurnati Abdullah, *45 Tahun Mengabdi Kepada Pers 1965- 2010: Sebuah Autobiografi.*, h. 15-16.

[45]*Wawancara* dengan bapak Usman Djakpar (Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 9 Agustus 2014.

Susunan kepengurusan setelah berganti nama menjadi *Nusa Putera* edisi Sumatera Selatan juga ikut berubah. Susunan pengurusnya adalah sebagai berikut. Pimpinan Umum/Redaksi adalah A. Marzuki Yahya. Sementara itu, Usman Djakpar, M. Yusuf Rambang dan Kurnati Abdullah menjadi Anggota Dewan Redaksi. *Nusa Putera* memiliki motto "Mengumandangkan Hati Nurani Rakyat". Motto ini dibuat sesuai dengan fungsi dan tujuannya sebagai media pembela rakyat.

Pasca perubahan nama dan berafiliasi kepada partai PSII, SKM. *Nusa Putera* edisi Sumatera Selatan kembali terbit di tengah-tengah masyarakat pada akhir tahun 1967 M, tetapi setelah itu koran *Nusa Putera* edisi Sumsel periode penerbitannya tidak lagi teratur sampai tahun 1968 M. Hal ini disebabkan oleh pengasuhnya banyak yang mengikuti gerakan Angkatan 66.[46]

Pada Januari 1969 M, Koran *Nusa Putera* edisi Sumatera Selatan terbit kembali dengan pengasuh baru dari PSII Sumsel. Sebagai Pimpinan Umum Iskandar Akmal; Wakil Ramly Nurhapy; Pimred/Penanggung jawab M. Yusuf Rambang; Wakil Usman Djakpar; dan Pimpinan Administrasi Kurnati Abdullah. Salah satu tujuan *Nusa Putera* diterbitkan kembali oleh DPW PSII Sumsel, karena akan menghadapi Pemilu 1971 M.[47] Persiapan menghadapi pemilu tersebut berupa kontrol sosial politik dan juga penyulur suara PSII itu sendiri dalam masa kampanye.

Selama beberapa bulan SKM. *Nusa Putera* sejak terbit kembali Januari 1969 M berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 102, rumah almarhum Dr. M. Ali Lie Kiat Teng, mantan Menteri Kesehatan RI dan juga sebagai bendahara DPP PSII Sumsel. Banyak masukan dan dorongan yang diberikan Dr. M. Ali Lie Kiat Teng kepada pengurus *Nusa Putera* untuk memajukan koran. Bahkan, Dr. Lie Kiat Teng bercerita saat ia menjadi Menteri Kesehatan zaman Presiden Soekarno menggagas pembangunan Rumah Sakit Umum Palembang. Namun, keadaan itu tidak bertahan lama, *Nusa Putera* diusir berkantor di rumahnya karena ada pemberitaan tentang anak pejabat Polda Sumbagsel yang berbuat kriminal dan mempunyai hubungan kedekatan dengan anak Dr. M. Ali Lie Kiat Teng. Inilah bagian dari tekanan pers saat itu untuk *Nusa Putera* edisi Sumsel.[48]

---

[46] *Ibid.*
[47] Kurnati Abdullah, *45 Tahun Mengabdi Kepada Pers 1965- 2010: Sebuah Autobiografi.*, h. 17-18.
[48] *Ibid.*, h. 19.

Perjalanan SKM. *Mimbar Masjarakat* kurang lebih selama satu setengah tahun (1965 M-1967 M awal), yang kemudian berubah menjadi *Nusa Putera* edisi Sumsel pada 1967 M, akhirnya menemui titik kemunduranya hingga tidak terbit lagi pada tahun 1972 M. Hal demikian terjadi karena PSII sebagai partai afiliasi saat itu tidak lagi mampu membiayai SKM. *Nusa Putera* edisi Sumsel menjelang pemilu 1971 M, sehingga *Nusa Putera* diambil alih oleh yayasan lain. M. Yusuf Rambang mengambil alih kepemimpinan *Nusa Putera* sebagai Pimpinan Umum/Perusahaan dan Kurnati Abdullah sebagai Pimpinan Redaksi.[49]

Kantor *Nusa Putera* pun dipindahkan ke Jalan Kartini No. 9, Palembang. Namun, usaha tersebut tidak bertahan lama karena status yayasan penerbit dikuasai nama lain yang tidak jelas lagi alamatnya, situasi politik saat itu menghadapi pemilu 1971 M, dan PSII tidak memberikan dana yang cukup, akhirnya SKM. *Nusa Putera* edisi Sumatera Selatan pun tersendat-sendat terbitnya dan awal tahun 1972 M sudah tidak terbit lagi. Banyak wartawan *Nusa Putera* pindah ke beberapa koran lain yang masih eksis keberadaannya, seperti: *Api Djihad*, *Garuda Post*, *Ampera*, *Suara Rakjat*, dan lainnya. Keberadaan koran ini tetap bertahan karena koran ini tidak berafiliasi ke partai politik mana pun pada saat itu.[50]

Deskripsi Umum SKM. *Nusa Putera* Edisi Sumatera Selatan

Perubahan nama dan kepemilikan SKM. *Mimbar Masjarakat* menjadi *Nusa Putera* edisi Sumatera Selatan, tentu membawa perubahan terhadap beberapa unsur di dalamnya, seperti kepemimpinan perusahaan, struktur organisasi, motto, dan desain perwajahan surat kabar (*layout*). Semua sejarah dan perubahan tersebut telah diuraikan dalam bab III pada tulisan ini. SKM. *NP* merupakan milik partai Islam, yakni Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), yang bermotto "Mengumandangkan Hati Nurani Rakyat" dan berazaskan pada Islam, tidak jauh berbeda dengan sebelum mengganti nama menjadi *NP*, yaitu ketika masih SKM. *Mimbar Masjarakat* di bawah naungan Organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Desain tataruang (*layout*) dari sebuah koran atau media cetak sangat bergantung pada peralatan dan teknologi percetakan yang digunakan. Selain itu, kemampuan SDM

[49]*Wawancara* dengan Bapak Usman Djakpar (Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 9 Agustus 2014.
[50]*Ibid.*

juga berpengaruh dalam desain yang dihasilkan. Surat kabar *NP* setelah resmi berubah nama dari *Mimbar Masjarakat*, mulai terbit pada era awal Orde Baru tepatnya pada tahun 1966, dan tempat percetakan pun berpindah. Ketika masih sebagai *Mimbar Masjarakat*, surat kabar ini dicetak oleh Percetakan C.V. Rambang yang berada di Jalan Mayor Ruslan Palembang. Kemudian, berpindah ke Percetakan N.V. Meru di 7 Ulu Palembang setalah menjadi *NP* di bawah naungan PSII.[51]

Percetakan N.V. Meru 7 Ulu merupakan perusahaan percetakan dan penerbitan yang kedua setelah Percetakan C.V. Rambang. Alat dan teknologi yang digunakan oleh percetakan ini juga hampir sama dengan Percetakan C.V. Rambang, sama-sama menggunakan peralatan cetak dan mesin pres manual, karena pada saat itu memang belum ada mesin cetak yang canggih dan otomatis seperti sekarang ini. Pengetikan dan pengeditan berita pun masih menggunakan mesin ketik manual. Hampir semua koran yang dicetak ketika itu, termasuk SKM. *NP*, hanya bisa dicetak empat halaman per surat kabar dengan desain *layout* yang sederhana. Hal ini disebabkan karena keterbatasan teknologi yang digunakan serta kertas koran yang agak sulit didapatkan. Berikut *layout* wajah SKM. *NP* edisi Sumsel, cetakan minggu pertama ketika terbit kembali Januari 1969 M/ Syawal 1388 H.

PELITA SUKSES BILA PELAKSANAANJA BERSIH

Nusa+utera

Edisi SUMATERA SELATAN

MENGUMANDANGKAN HATI NURANI RAKJAT.

Minggu pertama DJANUARI 1969 M. / SJAWAL 1388 H. No. 1 Th. ke V

Quo Vadis Pemerintah Daerah Sumsel

Rakjat Sumsel sudah apatis Penjelewengan ber-ulang2 terdjadi

Sambutan Api Djihad :

Selamat Berdjuang

BERBUAT MESUM DA- LAM PERAHU

Sambutan Api Pantjasila

Berdjuang tidak ada menge nal batas dan waktu

TJINA WSL gagal disidangkan?

Saksi Bhrd disingkirkan ke Amerika?

Fakta bitjara

Sambutan Gubernur Propinsi Su matera Selatan Palembang

Sambutan: Ketua DPRD Sum. Sel. A. Zaidan Djauhari.

Nusa Putera Rivaal bagi Ko- munis /ORLA

Dalam rangka penerbitan kembali Surat-kabar NUSA-PUTERA Palembang.

51 *biografi*

(Palem

Gambar 1:
Halaman pertama (*headlines*) SKM. *Nusa Putera* Edisi Sumsel
(Sumber gambar: Koleksi Pribadi H. Kurnati Abdullah)

Bagian depan sebuah koran atau halaman pertama, merupakan *cover* (sampul) dari surat kabar tersebut yang digunakan untuk memuat berita-berita utama, berita aktual, dan berita menarik. Bagian inilah yang sering disebut sebagai *headline* (kepala berita atau berita utama). *Headline* adalah sajian yang mampu membuat orang penasaran akan suatu pemberitaan dan produk pemberitaan itu sendiri, di samping sebagai tolok ukur penting atau tidaknya suatu peristiwa untuk disiarkan secara umum.[52]

Di dalam teori jurnalistik, *headline* sebuah surat kabar merupakan etalase yang merepresentasikan isu penting yang diliput dan diberitakan pada edisi bersangkutan. Oleh karena itu, setiap pengelola *news room* surat kabar akan melakukan seleksi ketat agar berita yang ditempatkan sebagi berita utama benar-benar memiliki bobot dan kualitas jurnalistik yang standar. *Headline news* yang bagus adalah yang mampu membuat orang tertarik dan penasaran membaca beritanya hingga tuntas. Di samping

[52]Pemelianna Pardede, dkk., "Analisis Isi Kepatuhan Terhadap Standar Jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik" dalam http://kippas.wordpress.com/2011/10/03/profesionalisme-headline-surat-kabar-analisa, di akses pada 25 Agustus 2014, pukul 21.24 wib.

itu, ada pula pengertian *headline* yang lain, yaitu berita-berita menarik yang dijadikan topik utama dan dipasang di halaman depan pada media massa koran.[53]

Teori dan beberapa definisi di atas merupakan teori baru yang muncul ketika dunia pers merambah ke era teknologi modern. Namun, pada dasarnya sebelum teori-teori itu di kemukakan, koran-koran dan media massa pada masa Orde Baru seperti *NP*, juga telah memakai teori tersebut. Sebagaimana yang terlihat pada gambar halaman depan *NP* di atas (gambar 8), menunjukkan telah menggunakan apa yang diungkapkan seperti teori tersebut. Halaman utama atau covernya memuat berita-berita hangat dan aktual pada masa itu, berita inilah yang menjadi *headline news*. Judul atau topik berita ditampilkan dengan huruf lebih besar dan menonjol, serta ditambah pemilihan topik yang cukup menarik perhatian dan membuat penasaran pembaca untuk mengetahui informasi yang ada di dalamnya. Hanya saja, sedikit kekurangan dan perbedaan dengan koran-koran saat ini, yaitu *headline*-nya tidak memiliki foto-foto sebagai gambaran pembaca akan peristiwa atau informasi yang disampaikan.

Kembali pada prosesnya, bahwa kekurangan dan perbedaan tersebut adalah karena teknologi yang digunakan dalam mengemas, memproses, dan mencetak berita hingga menjadi sebuah koran ialah alat-alat dan mesin manual. Tentunya tidak semudah dan secanggih saat ini, hanya membutuhkan hitungan jam untuk mencetak beberapa berita yang baru saja didapatkan oleh wartawan.

Pada halaman utama, selain memuat *headline news*, surat-surat kabar tahun 1960-an seperti *NP*, memuat informasi nomor izin terbit, harga eceran, harga langganan, dan harga langganan iklan pada kolom pojok kanan atas atau di samping kanan nama surat kabar. Kemudian, di kolom sebelah kiri atas memuat informasi kepengurusan SKM. *Nusa Putera* edisi Sumsel periode tersebut, seperti: Pimpinan Umum, Wakil Pimpinan Umum, Pimpinan Redaksi, Dewan Redaksi, dan Pimpinan Administrasi, serta alamat redaksi dari perusahaan tersebut.

Selanjutnya, halaman II dan III SKM. *NP* memuat berita peting lainnya, seperti: berita politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan yang sangat ditonjolkan adalah berita, opini, nasihat dan pesan-pesan moral agama Islam. Berikut tampilan halaman II dan III SKM. *NP*:

[53]Teofillus, "Proses Penentuan Headline Surat Kabar: Studi pada Harian Manado Post", *Skripsi* (Manado: Fakultas Ilmu Sosial Univ. Negeri Manado, 2013), h. 7.

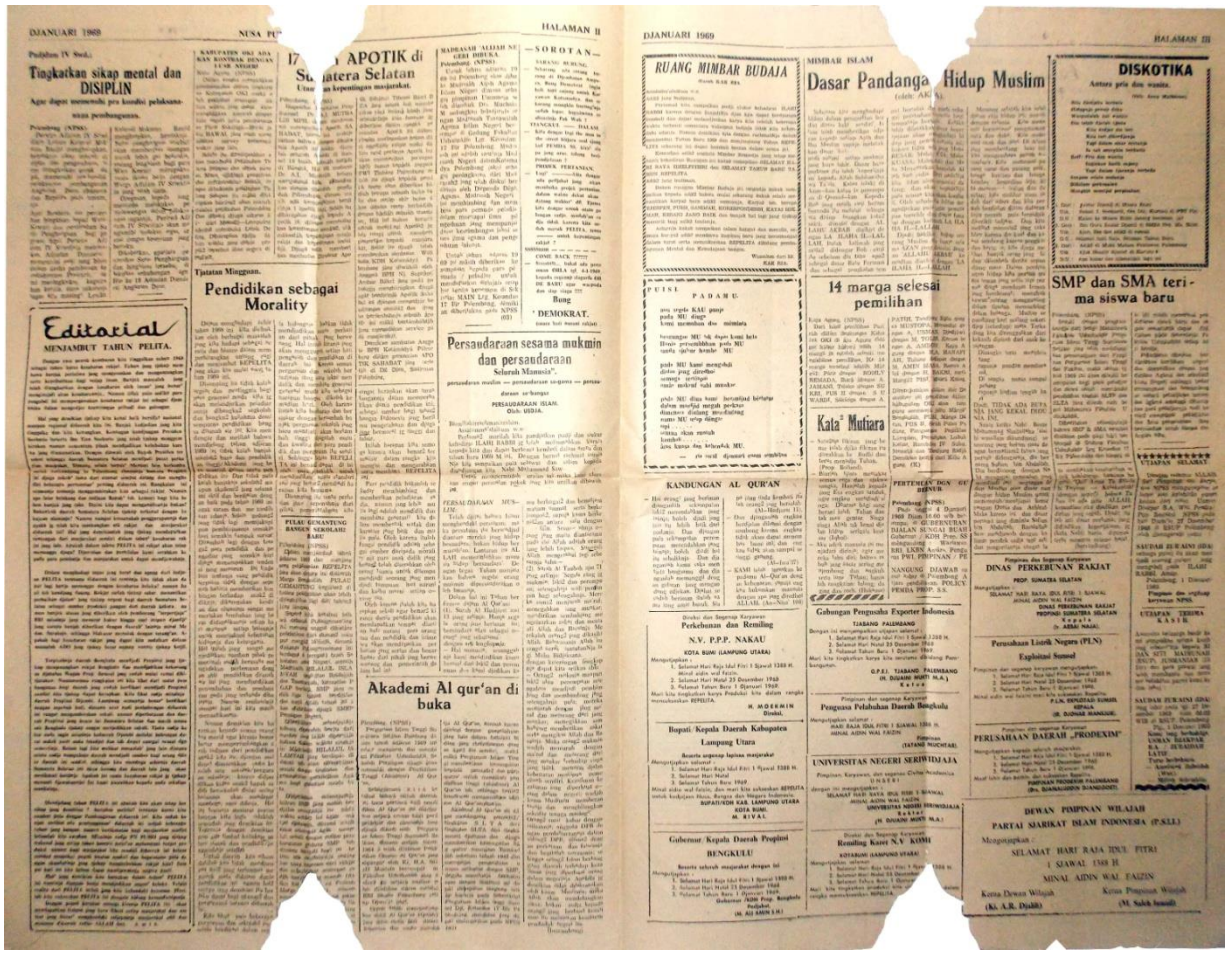

Gambar 2:
Wajah halaman II dan III *Nusa Putera* Edisi Sumsel tahun 1969 M
Minggu Pertama No. I. Th. 3.
(Sumber: Koleksi pribadi H. Kurnati Abdullah)

Di halaman III (sebelah kanan) pada bagian kolom-kolom paling bawah, merupakan iklan dari berbagai perusahaan swasta, BUMN, instansi pemerintahan dan lainnya. Isi iklan tersebut berbagai macam, baik berupa ucapan selamat dan promosi produk. Namun, jika diperhatikan iklan tersebut lebih banyak berupa ucapan selamat

Hari Raya Idul Fitri dan Natal, karena edisi tersebut terbit bertepatan pada Idul Fitri 1 Syawal 1388 H, Natal 25 Desember 1969 dan Tahun Baru Januari 1969 M.[54]

Sebagian besar berita yang ditampilkan dalam halaman II dan III *NP* berikut, adalah berupa berita pendidikan, promosi pendidikan dan pesan-pesan dakwah agama Islam. Tampak pada beberapa topik dan judul berita yang diangkat seperti berikut: "Pendidikan Sebagai Morality" (halaman II kolom 3-4), "Akademi Al qur'an di Buka" (halaman II kolom 5 bawah), "Persaudaraan Sesama Mukmin dan Persaudaraan seluruh Manusia" (halaman II kolom 6-7), dan "Mimbar Muslim: "Dasar Pandangan Hidup Muslim" (halaman III kolom 2-4).[55]

Berita-berita dan informasi mengenai Islam ini diangkat karena SKM. *NP* memiliki basis Islam dan pemiliknya pun partai Islam, yaitu PSII. Karena itulah, berita dan informasi yang disampaikan cenderung kepada pesan-pesan agama. Namun, *NP* tetap tidak meninggalkan fungsinya sebagai surat kabar ideal yang memberikan informasi secara luas tentang berbagai macam aspek kehidupan dunia. Hal ini tercermin dari kompleksnya berita-berita yang dimuat pada setiap edisinya.

Berikut ini adalah halaman IV dari SKM. *NP*, ini merupakan halaman terakhir dari surat kabar yang isinya tidak lain berupa penutup dan iklan-iklan saja dari berbagai sponsor, baik dari kalangan perusahaan maupun dari pemerintahan yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan ketika itu.

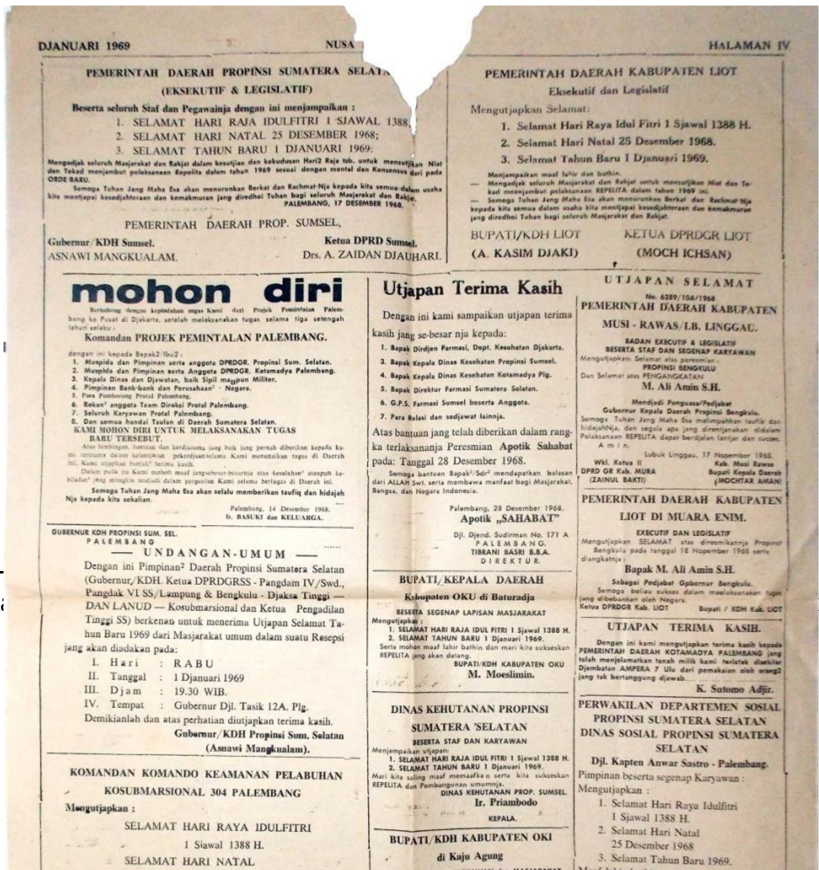
DJANUARI 1969 NUSA HALAMAN IV

PEMERINTAH DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
(EKSEKUTIF & LEGISLATIF)
Beserta seluruh Staf dan Pegawainja dengan ini menjampaikan :
1. SELAMAT HARI RAJA IDULFITRI 1 SJAWAL 1388,
2. SELAMAT HARI NATAL 25 DESEMBER 1968;
3. SELAMAT TAHUN BARU 1 DJANUARI 1969:
Mengadjak seluruh Masjarakat dan Rakjat dalam kesutjian dan kekudusan Hari2 Raja tsb. untuk mensutjikan Niat dan Tekad menjambut pelaksanaan Repelita dalam tahun 1969 sesuai dengan mental dan Konsensus dari pada ORDE BARU.
Semoga Tuhan Jang Maha Esa akan menurunkan Berkat dan Rachmat-Nja kepada kita semua dalam usaha kita mentjapai kesedjahteraan dan kemakmuran jang diredhoi Tuhan bagi seluruh Masjarakat dan Rakjat.
PALEMBANG, 17 DESEMBER 1968.
PEMERINTAH DAERAH PROP. SUMSEL,
Gubernur/KDH Sumsel. ASNAWI MANGKUALAM.
Ketua DPRD Sumsel. Drs. A. ZAIDAN DJAUHARI.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIOT
Eksekutif dan Legislatif
Mengutjapkan Selamat:
1. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Sjawal 1388 H.
2. Selamat Hari Natal 25 Desember 1968.
3. Selamat Tahun Baru 1 Djanuari 1969.
Menjampaikan maaf lahir dan bathin.
— Mengadjak seluruh Masjarakat dan Rakjat untuk mensutjikan Niat dan Tekad menjambut pelaksanaan REPELITA dalam tahun 1969 ini.
— Semoga Tuhan Jang Maha Esa akan menurunkan Berkat dan Rachmat-Nja kepada kita semua dalam usaha kita mentjapai kesedjahteraan dan kemakmuran jang diredhoi Tuhan bagi seluruh Masjarakat dan Rakjat.
BUPATI/KDH LIOT (A. KASIM DJAKI)
KETUA DPRDGR LIOT (MOCH ICHSAN)

mohon diri
Berhubung dengan kepindahan tugas Kami dari Projek Pemintalan Palembang ke Pusat di Djakarta, setelah melaksanakan tugas selama tiga setengah tahun selaku :
Komandan PROJEK PEMINTALAN PALEMBANG.
dengan ini kepada Bapak2/Ibu2 :
1. Muspida dan Pimpinan serta anggota DPRDGR. Propinsi Sum. Selatan.
2. Muspida dan Pimpinan serta Anggota DPRDGR. Kotamadya Palembang.
3. Kepala Dinas dan Djawatan, baik Sipil maupun Militer.
4. Pimpinan Bank-bank dan Perusahaan² - Negara.
5. Para Pemborong Protal Palembang.
6. Rekan² anggota Team Direksi Protal Palembang.
7. Seluruh Karyawan Protal Palembang.
8. Dan semua handai Taulan di Daerah Sumatera Selatan.
KAMI MOHON DIRI UNTUK MELAKSANAKAN TUGAS BARU TERSEBUT.
Semoga Tuhan Jang Maha Esa akan selalu memberikan taufiq dan hidajah Nja kepada kita sekalian.
Palembang, 14 Desember 1968.
Ir. BASUKI dan KELUARGA.

Utjapan Terima Kasih
Dengan ini kami sampaikan utjapan terima kasih jang se-besar nja kepada:
1. Bapak Dirdjen Farmasi, Dept. Kesehatan Djakarta.
3. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumsel.
4. Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kotamadya Plg.
5. Bapak Direktur Farmasi Sumatera Selatan.
6. G.P.S. Farmasi Sumsel beserta Anggota.
7. Para Relasi dan sedjawat lainnja.
Atas bantuan jang telah diberikan dalam rangka terlaksananja Peresmian Apotik Sahabat pada: Tanggal 28 Desember 1968.
Semoga bantuan Bapak²/Sdr² mendapatkan balasan dari ALLAH Swt. serta membawa manfaat bagi Masjarakat, Bangsa, dan Negara Indonesia.
Palembang, 28 Desember 1968.
Apotik „SAHABAT"
Djl. Djend. Sudirman No. 171 A PALEMBANG.
TIBRANI BASRI B.B.A. DIREKTUR.

UTJAPAN SELAMAT
No. 6289/10A/1968
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI - RAWAS/LB. LINGGAU.
BADAN EXECUTIF & LEGISLATIF BESERTA STAF DAN SEGENAP KARYAWAN
Mengutjapkan: Selamat atas peresmian : PROPINSI BENGKULU
Dan Selamat atas PENGANGKATAN
M. Ali Amin S.H.
Mendjadi Penguasa/Pedjabat Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bengkulu.
Semoga Tuhan Jang Maha Esa melimpahkan taufik dan hidajahNja, dan segala apa jang direntjanakan didalam Pelaksanaan REPELITA dapat berdjalan lantjar dan sucses. Amin.
Lubuk Linggau, 17 Nopember 1968.
Wkl. Ketua II DPRD GR Kab. MURA (ZAINUL BAKTI)
Kab. Musi Rawas Bupati Kepala Daerah (MOCHTAR AMAN)

GUBERNUR KDH PROPINSI SUM. SEL. PALEMBANG
— UNDANGAN-UMUM —
Dengan ini Pimpinan² Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Gubernur/KDH. Ketua DPRDGRSS - Pangdam IV/Swd., Pangdak VI SS/Lampung & Bengkulu - Djaksa Tinggi — DAN LANUD — Kosubmarsional dan Ketua Pengadilan Tinggi SS) berkenan untuk menerima Utjapan Selamat Tahun Baru 1969 dari Masjarakat umum dalam suatu Resepsi jang akan diadakan pada:
I. Hari : RABU
II. Tanggal : 1 Djanuari 1969
III. Djam : 19.30 WIB.
IV. Tempat : Gubernur Djl. Tasik 12A. Plg.
Demikianlah dan atas perhatian diutjapkan terima kasih.
Gubernur/KDH Propinsi Sum. Selatan (Asnawi Mangkualam).

BUPATI/KEPALA DAERAH Kabupaten OKU di Baturadja
BESERTA SEGENAP LAPISAN MASJARAKAT
Mengutjapkan :
1. SELAMAT HARI RAJA IDUL FITRI 1 Sjawal 1388 H.
2. SELAMAT TAHUN BARU 1 Djanuari 1969.
Serta mohon maaf lahir bathin dan mari kita sukseskan REPELITA jang akan datang.
BUPATI/KDH KABUPATEN OKU M. Moeslimin.

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIOT DI MUARA ENIM.
EXECUTIF DAN LEGISLATIF
Mengutjapkan SELAMAT atas diresmikannja Propinsi Bengkulu pada tanggal 18 Nopember 1968 serta diangkatnja :
Bapak M. Ali Amin S.H.
Sebagai Pedjabat Gubernur Bengkulu.
Semoga beliau sukses dalam melaksanakan tugas jang dibebankan oleh Negara.
Ketua DPRDGR Kab. LIOT Bupati / KDH Kab. LIOT

UTJAPAN TERIMA KASIH.
Dengan ini kami mengutjapkan terima kasih kepada PEMERINTAH DAERAH KOTAMADYA PALEMBANG jang telah menjelamatkan tanah milik kami terletak disekitar Djembatan AMPERA 7 Ulu dari pemakaian oleh orang2 jang tak bertanggung djawab.
K. Sutomo Adjir.

DINAS KEHUTANAN PROPINSI SUMATERA SELATAN
BESERTA STAF DAN KARYAWAN
Menjampaikan utjapan:
1. SELAMAT HARI RAJA IDUL FITRI 1 Sjawal 1388 H.
2. SELAMAT TAHUN BARU 1 Djanuari 1969.
Mari kita saling maaf memaafkan serta kita sukseskan REPELITA dan Pembangunan umumnja.
DINAS KEHUTANAN PROP. SUMSEL. Ir. Priambodo KEPALA.

KOMANDAN KOMANDO KEAMANAN PELABUHAN KOSUBMARSIONAL 304 PALEMBANG
Mengutjapkan :
SELAMAT HARI RAYA IDULFITRI 1 Siawal 1388 H.
SELAMAT HARI NATAL

BUPATI/KDH KABUPATEN OKI di Kaju Agung

PERWAKILAN DEPARTEMEN SOSIAL PROPINSI SUMATERA SELATAN DINAS SOSIAL PROPINSI SUMATERA SELATAN
Djl. Kapten Anwar Sastro - Palembang.
Pimpinan beserta segenap Karyawan :
Mengutjapkan :
1. Selamat Hari Raya Idulfitri 1 Sjawal 1388 H.
2. Selamat Hari Natal 25 Desember 1968
3. Selamat Tahun Baru 1969.

[54]Surat Ka... nuari 1969 M) hal, III.

[55]*Ibid.*

Gambar 3:
Halaman IV (akhir) SKM. *Nusa Putera* edisi Sumsel tahun 1969 M.
(Sumber gambar: Koleksi pribadi H. Kurnati Abdullah)

Isi dari pada iklan-iklan pada halaman IV surat kabar ini sebagian besar adalah ucapan selamat hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1388 H, hari Raya Natal 25 Desember 1968 M, dan Tahun Baru 1 Januari 1969 M dan ucapan terima kasih, sama persis pada halaman III bagian bawah. Namun, ucapan selamat, ucapan terima kasih dan ucapan mohon diri dari perusahaan dan instansi yang berbeda pula.

SKM. *NP* yang terbit pada periode 1969 M, merupakan terbitan minggu pertama pada Januari 1969 M. Penerbitan ini juga merupakan langkah awal memulai kembali terbit, setelah mengalami masa transisi dari *Mimbar Masjarakat* dan tekanan PKI pada tahun 1967 M hingga 1968 M. Pada tahun itu, penerbitan *NP* tidak teratur bahkan terhenti. Oleh karena itulah, edisi ini merupakan terbitan kembali *NP*.[56]

Pasca mendapat izin terbit kembali dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dari Departemen Penerangan Pusat. SKM. *NP* memilih N.V. Meru di 7 Ulu Palembang untuk mencetak surat kabarnya. Proses percetakan hingga surat kabar terbit ketika itu cukup memakan waktu, mulai dari satu sampai dua hari baru bisa terbit dan dijual atau diedarkan kepada pelanggan dalam dan luar kota. Meskipun terbit seminggu sekali, pembeli dan pelanggan *NP* terbilang cukup banyak.

[56]Kurnati Abdullah, *45 Tahun Mengabdi Kepada Pers 1965- 2010: Sebuah Autobiografi,* h. 18-19.

Harga jual eceran, langganan, dan iklan SKM. *NP* tertera pada halaman depan atau sampul surat kabar, yaitu dalam kolom atas bagian pojok kanan. Harga tersebut sebagai berikut. Harga eceran Rp. 10,- – untuk dalam/ luar kota; harga langganan Rp. 200,- per bulan; dan harga iklan Rp. 15,- per mm kolom.[57]

Harga yang tertera merupakan harga dari redaksi dan percetakan. Jumlah oplah SKM. *NP* dalam sekali terbit (per minggu) sekitar 100 sampai 200 lembar (satu lembar berjumlah 4 halaman). Jumlah ini sudah terbilang maksimal di setiap percetakan. Karena, Percetakan N.V. Meru dan C.V. Rambang bukan percetakan profesional surat kabar, melainkan percetakan umum yang mencetak berbagai macam cetakan seperti buku, majalah dan lainnya.[58]

Kalangan pelanggan dan pembaca *NP*, umumnya adalah masyarakat Kota Palembang dan luar kota di wilayah Sumatera Selatan seperti, Kabupaten Muara Enim, Lahat, Ogan Koring Ilir dan lainnya. Namun, tidak semua lapisan masyarakat yang berminat, melainkan masyarakat kalangan menengah dan kaum intelektual atau berpendidikan yang punya minat baca dan sangat membutuhkan informasi. Bahkan, tidak dipungkiri sebagian lainnya adalah politisi dari partai pemilik surat kabar itu sendiri.[59]

Dengan demikian, kemajuan dan pertumbuhan semua surat kabar termasuk *NP* pada tahun itu, terbilang tidak mengalami pertumbuhan signifikan secara komersial dan secara fungsi pers itu sendiri, karena masih terkekang oleh pengawasan pemerintah melalui Departemen Penerangan pada masa transisi Orde Lama ke Orde Baru. Salah satu contoh pengekangan atau ketidakbebasan pers ketika itu ialah adanya Surat Izin Terbit (SIT) dan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Jika dilihat, pada prinsipnya, semua surat kabar ketika itu sudah menyatakan diri sebagai pers "bebas bertanggung jawab". Bertanggung jawab kepada masyarakat dan kepada pemerintah atas berita dan informasi yang diterbitkan.

Peran SKM. *Nusa Putera* Edisi Sumsel

[57]Harga Iklan adalah harga yang harus dibayar oleh sponsor ketika memasang iklan berlangganan atau pun tidak pada SKM. *Nusa Putera* Edisi Sumsel.

[58]*Wawancara* dengan Bapak Usman Djakpar (Tokoh Pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada Agustus 2014.

[59]*Ibid.*

Berakhirnya SKM. *Mimbar Masjarakat* dan *Nusa Putera* yang berdiri sejak tahun 1965 M, bukan berarti tidak meninggalkan kesan perjuangan dan kemajuan yang dicapainya. Perjalanannya selama kurang lebih tujuh tahun (1965 M-1972 M) sebagai media massa, *NP* telah banyak meninggalkan jejak perjuangannya dan kesan baik di mata masyarakat Palembang khususnya. Melalui berbagai perannya sebagai surat kabar perjuangan yang berbasis Islam dan membawa perubahan pada masa Orde Lama menjelang Orde Baru, *NP* berperan serta dalam perubahan sosial masyarakat Palembang. Ketika kemelut kehidupan politik di Indonesia, yaitu dengan adanya pemberontakan PKI dan *Onderbouw*-nya[60] pada tahun 1965 M hingga 1967 M, *NP* berperan aktif dalam mepertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

[1] Peran NP dalam Kontrol Sosial dan Politik. Menurut catatan sejarah, media massa terbukti mampu mendorong dan mengubah kondisi sosial masyarakat. Dengan pemberitaan yang kontinyu, terarah dan sistematis, pers mampu mempengaruhi pilihan, sikap dan opini masyarakat. Media massa juga bisa membujuk pembaca, dengan merangsang emosi, perasaan serta pikiran mereka lewat berbagai pendapat dan komentar. Mereka juga bisa memberikan status legitimasi terhadap sesuatu hal. Media massa juga bisa mendefinisikan dan membentuk persepsi atas realitas tertentu kepada para pembaca.[61]

Karena itu, sejak zaman Belanda, pergerakan hingga kemerdekaan, banyak orang, penguasa, dan kelompok kepentingan atau organisasi, memanfaatkan media massa sebagai corong, alat, dan mesin perjuangan dalam perubahan sosial (*social exchange*).[62] Di zaman pergerakan pers menjadi media perlawanan terhadap penjajah dengan menyemai paham Nasionalisme untuk meraih kemerdekaan. Begitu pula ketika kemerdekaan, pers menjadi media alat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari pemberontakan PKI, meskipun ada sebagian media massa yang berpihak kepada PKI.

---

[60]*Onderbouw* yang merupakan kata lain dari organisasi sayap partai ini memiliki andil besar dalam kebesaran partai. Begitu juga dengan pengaruh *onderbouw* PKI ketika masa Orde Lama. *Onderbouw* PKI yang begitu dikenal antaranya adalah SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), BTI (Barisan Tani Indonesia), Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat), maupun dalam lingkup mahasiswa seperti CGMI (Consentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia). Lihat Angga Sukmara Christian Permadi, "Merasionalisasi Gagasan Kebangsaan Taufiq Kiemas", *Jurnal Skripsi*, No. 1, Vol. 1 (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), h. 7.

[61]Hanibal Wijayanta, "Media Massa dan Perubahan Sosial", dikutip dalam *http://pkspalembang.or.id/read/ 494 /media-massa-dan-perubahan-sosial/*, pada 28 Agustus 2014 pukul 21.38 wib.

[62]*Ibid.*

Dengan ini, jelaslah bahwa SKM. *NP* juga memiliki peran serta atau turut andil dalam kontrol sosial pada pemerintah dan masyarakat Kota Palembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya.

Sebagai lembaga sosial penyalur informasi dan penampung aspirasi masyarakat, *NP* yang dilahirkan dari organisasi dan partai Islam, tentu mempunyai etika dan prinsip kebenaran dalam mengemban amanah untuk menjalankan perannya. Peran yang dijalankan dalam kontrol sosial dan politik adalah melalui penyebaran informasi, opini, dan pemberitaan aktual, yang mampu mengobarkan semangat masyarakat untuk sadar akan kepentingan bersama dalam menjaga kesatuan NKRI pada masa itu. Namun, *NP* tidak lupa dengan ideologi dasarnya, yaitu menanamkan nilai-nilai Islami pada masyarakat, melalui informasi dan berita-berita Islam.[63]

Peran yang dijalankan *NP* sesuai dengan fungsi pers itu sendiri, yaitu menyiarkan informasi (*to inform*), mendidik (*to educate*) dan mempengaruhi (*to influence*). Menyiarkan informasi merupakan fungsi utama pers, masyarakat pembaca berlangganan atau membeli karena memerlukan informasi. Fungsi mendidik adalah sebagai sarana pendidikan massa, dengan tulisan-tulisan atau informasi yang mengandung pengetahuan, maka sudah pasti pembaca akan bertambah pengetahuannya. Sedangkan fungsi mempengaruhi merupakan fungsi yang memegang peran penting dalam kehidupan masyarakat sebagai kontrol sosial.[64] Oleh karena itu, fungsi-fungsi inilah yang dilakukan dalam menjalankan perannya sebagai media massa yang bebas dan bertanggung jawab.

Salah satu sumber primer yang menjadi bahan analisis penulis, yaitu berupa surat kabar *NP* Sumsel terbitan Januari 1969 M/ Syawal 1388 H, No. 1 Tahun ke-3. (gambar 8, 9 dan 10). Edisi ini merupakan edisi pertama tahun 1969 M, pasca dua tahun sebelumnya (1967-1968) mengalami masa sulit yang membuat penerbitannya tidak teratur, bahkan sempat terhenti.

Ketika terbit kembali pada edisi tersebut, judul *headline* penerbitannya cukup keras, "Quo Vadis Pemerintah Daerah Sumsel: Rakjat Sumsel sudah apatis Penjelewengan Berulang-ulang terjadi". Dalam pemberitaan ini, disoroti adanya

[63]*Wawancara* dengan bapak Bastari Suan (Tokoh masyarakat dan Budayawan Palembang), pada 15 Agustus 2014.

[64]Hanibal Wijayanta, "Media Massa dan Perubahan Sosial", dikutip dalam *http://pkspalembang.or.id/read/ 494 /media-massa-dan-perubahan-sosial/*, pada 28 Agustus 2014 pukul 21.38 wib.

penyelewengan uang Pemerintah Daerah Sumsel Anggaran Dana Operasional (ADO) sebesar Rp. 97.000.000 dan BII Rp. 15.000.000. Pemberitaan ini terbilang keras dan menarik perhatian banyak kalangan, karena uang tersebut hilang seolah tak berbekas dan Pemda Sumsel mendapat penggantian rumah milik H. Djojosuwarno di Jalan Ceylon Jakarta yang kini menjadi Mess Pemda Sumsel.[65] Berita inilah yang merupakan salah satu peran kontrol sosial politik *NP* yang berdasarkan fakta, sebab pada saat berita itu sudah diterbitkan, kritikan kepada Gubernur Sumsel Asnawi Mangku Alam dibenarkan dan diakuinya bahwa adanya penyelewengan dana tersebut oleh oknum-oknum pejabat Pemda itu sendiri yang masih dalam penanganan.[66]

Selanjutnya, dalam *headline* edisi yang sama *NP* memuat berita asusila sebagai pesan moral bagi masyarakat Sumsel. Judul *headline* berita tersebut ialah "Berbuat Mesum dalam Perahu". Peristiwa ini terjadi di daerah Sungsang,[67] sebagaimana yang dijelaskan dalam beritanya, bahwa perbuatan ini dilakukan oleh dua orang yang bukan pasangan sah. Berikut kutipan beritanya:

> Dari pembantu NPSS di Sungsang, didapat kabar bahwa beberapa waktu jang lalu telah terjadi peristiwa jang menghebohkan rakjat Sungsang dan menjadi tanda tanja bagaimana penjelasannja. Seorang penduduk bernama K telah berhasil melarikan perempuan bernama S. Seperti diketahui S adalah isteri dari H. Peristiwa ini telah didahului dengan tertangkap basahnja K dan S jang melakukan perbuatan mesum dalam perahu. Kedua machluk jang berbuat mesum tersebut diduga keras telah melakukan berkali2, hanja sang suami S tidak begitu tjuriga.....[68]

Secara tidak langsung berita tersebut memberi pesan moral dan menanamkan nilai-nilai agama kepada pembaca, bahwa perilaku tersebut merupakan perbuatan tak bermoral dan melanggar aturan agama Islam, yang tidak sepatutnya dicontoh. Setidaknya, dari berita tersebut pula telah memberi dampak yang positif yaitu membuat jera pelaku dan memberi peringatan kepada publik agar selalu berhati-hati dalam segala perbuatan, apalagi hal yang melanggar norma bangsa dan agama.

---

[65]Kurnati Abdullah, *45 Tahun Mengabdi Kepada Pers 1965- 2010: Sebuah Autobiografi*, h. 18-19.

[66]*Ibid.*

[67]Sungsang merupakan kota pesisir wilayah Kabupaten Banyuasin Sumsel yang berkembang. Kecamatan Banyuasin II lebih dikenal dengan nama Sungsang. Kota Sungsang terletak di wilayah paling ujung Sumatera Selatan dan dekat dengan perbatasan dengan provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lihat dalam situs berikut: *http://id.wikipedia.org/wiki/Banyuasin_II,_Banyuasin.*

[68]Surat Kabar Mingguan *Nusa Putera* Edisi Sumsel, (Palembang: No. 1 Th. Ke-3, Januari 1969 M) h. I.

[2] Peran dalam Pendidikan Islam. Salah satu fungsi pers yang dilakukan oleh SKM. *NP* edisi Sumsel dalam perannya adalah fungsi pendidikan. Fungsi mendidik ini biasanya secara implisit dalam bentuk artikel atau tajuk rencana maupun berita yang disajikan.

Di dalam konteks pendidikan ini, SKM. *NP* tidak hanya berperan penting dalam mensosialisasikan kemajuan-kemajuan dalam bidang pendidikan yang telah dicapai, baik di Kota Palembang maupun di pedesaan atau bagian Kota Palembang dalam wilayah Sumatera Selatan, tetapi juga mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat Palembang terhadap pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa, khususnya umat Islam.[69] Berbagai artikel dan berita tentang pendidikan Islam mengandung informasi, ajakan, dan himbauan yang mengarahkan masyarakat kepada kesadaran terhadap pentingnya pendidikan Islam bagi generasi muda Muslim.

Beberapa contoh tulisan editorial terkait topik pendidikan, misalnya yang dimuat dalam SKM. *NP* edisi Sumsel sebagai berikut: "Pendidikan sebagai Morality", "Akademi Al quran di Buka" dan "Persaudaraan sesama Mukmin dan persaudaraan seluruh manusia". Ketiga topik ini sangat mencerminkan isi di dalamnya mengenai pendidikan Islam. Pada topik pertama "Pendidikan sebagai Morality", di dalamnya menampilkan informasi, ajakan serta himbauan tentang pentingnya pendidikan sebagai ciri moral bangsa di Tanah Air ini. Pada awal tulisannya dikatakan sebagaimana kutipan berikut:

> Dalam menghadapi achir tahun 1968 ini kita disibukkan oleh berbagai masalah yang kita hadapi sebagai neratja dalam memperhitungkan untung rugi dan menjambut REPELITA yang akan kita mulai awal tahun 1969 ini.
>
> Di samping itu tidak kalah urgen dan pentingnja bagi para generasi muda kita jang akan melandjutkan peladjarannja di bangku2 sekolah dan bangku2 kuliahnja demi sempurna pendidikan bangsa di tanah air ini. Kita mendengar dan melihat bahwa mendjelang tahun adjaran 1969 ini tidak kalah banjak sekolah2 baru dan pendidikan tinggi/Akademi yang baru muntjul dalam arena pendidikan ini.....[70]

Kalimat-kalimat dalam pendahuluan artikel atau tulisan ini, sedikit banyak sudah memberikan gambaran dan ajakan untuk terus mengedepankan pendidikan yang

[69]Ismail Sukardi, *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Palembang* (Semarang: Need Prees, 2010), h. 405.

[70]Surat Kabar Mingguan *Nusa Putera* Edisi Sumsel, (Palembang: No. 1 Th. Ke-3, Januari 1969 M), h. II.

semakin lama semakin berkembang. Bujukan serta ajakan dalam artikel tersebut sebenarnya ditujukan ke semua sistem pendidikan, baik umum atau pun pendidikan Islam yang kedua-duanya akan mencetak generasi muda yang berilmu dan bermoral tinggi. Bukan hanya untuk peserta didik saja yang diberikan pencerahan, tetapi juga unsur-unsur yang ada dalam organisasi pendidikan, seperti tenaga pendidik atau guru, pengelolah pendidikan atau kepala sekolah beserta stafnya, dan pemerintah yang mempunyai wewenang dalam bidang pendidikan tersebut. Karena itulah, kritik, saran dan masukan yang konstruktif selalu diutamakan dalam berita-berita atau informasi terbitan SKM. *NP* edisi Sumsel. Sebab, dengan berbagai opini yang ada, tentunya hal-hal yang berkaitan dengan kemajuan pendidikan, diharapkan dapat membangun persepsi tersendiri bagi kalangan pembaca, terutama mereka yang ada dalam dunia pendidikan untuk bangkit mengedepankan pendidikan.

Kemudian, topik selanjutnya mengenai "Akademi Alquran di Buka". Topik ini merupakan sebuah berita atau informasi untuk masyarakat muslim di Palembang khususnya. Pendidikan tinggi/Akademi Al quran tersebut adalah yang pertama kali didirikan di Palembang pada tahun 1969 M sebagai salah satu wadah bagi pemuda pemudi muslim untuk mendalami dan mengembangkan ilmu Alquran serta agama Islam. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai media massa yang cendrung kepada ideologi agama Islam, sepatutnyalah jika sebagian besar isi berita, informasi, opini dan iklan tentang unsur-unsur Islam menjadi prioritas utama.

Selain memuat berbagai berita, iklan, dan opini baik pendidikan Islam ataupun umum, *NP* edisi Sumsel sangat jelas menunjukkan perannya sebagai media massa Islam dengan memuat beberapa artikel atau tulisan dakwah. Salah satunya ialah artikel yang ditulis oleh Usdja yang berjudul "Persaudaraan sesama mukmin dan persaudaraan Seluruh Manusia". Dalam artikel yang singkat tersebut, Usdja menyampaikan beberapa poin penting mengenai persaudaraan sesama muslim dan seluruh manusia.[71] Dari poin-poin tersebut penyampainnya diiringi dengan dalil[72] ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan tema itu sebagai penguat. Pada bagian awal tulisannya Usdja mengatakan:

> Telah djelas bahwa Islam menghendaki persatuan: maka persatuan itu berwudjud di antara mereka jang hidup bersaudara, bukan hidup bermusuh-musuhan. Lantaran itu ALLAH memerintahkan manusia hidup bersaudara.

[71] *Ibid.*

[72] Kata "dalil" dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) merupakan keterangan yang dijadikan bukti atau alasan suatu kebenaran (terutama berdasarkan ayat Alquran)

> Dengan tegas Tuhan menjatakan bahwa segala orang mukmin dipersaudarakan oleh imannja.
>
> Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al quran: (1) Surah Al-Hujrat ajat 13 jang artinja: Hanja segala orang jang beriman itu bersaudara atau sebagai orang-orang jang sekutumu[73]...

Masih ada beberapa ayat lagi yang dijadikan dalil dalam tulisan Usdja tersebut berkaitan dengan persaudaraan. Setidaknya, sedikit gambaran dari isi artikel atau tulisan tersebut, dapat mengeksplanasikan kepada pembaca bahwa SKM. *NP* ketika itu benar-benar menjalankan perannya dalam bidang pendidikan, baik secara pendidikan umum dan secara pendidikan Islami.

Berikutnya, pada halaman III SKM. *NP*, juga masih memuat beberapa artikel Islami sebagai wahana dakwah secara tertulis, seperti: "Isi Kandungan Alquran", yang di dalamnya menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat Alquran. Dalam artikel kandungan Alquran ini, terdapat dua ayat dari surah yang berbeda. Ayat-ayat dalam artikel tersebut sebagai berikut:

QS. Al-Hujrat: 11

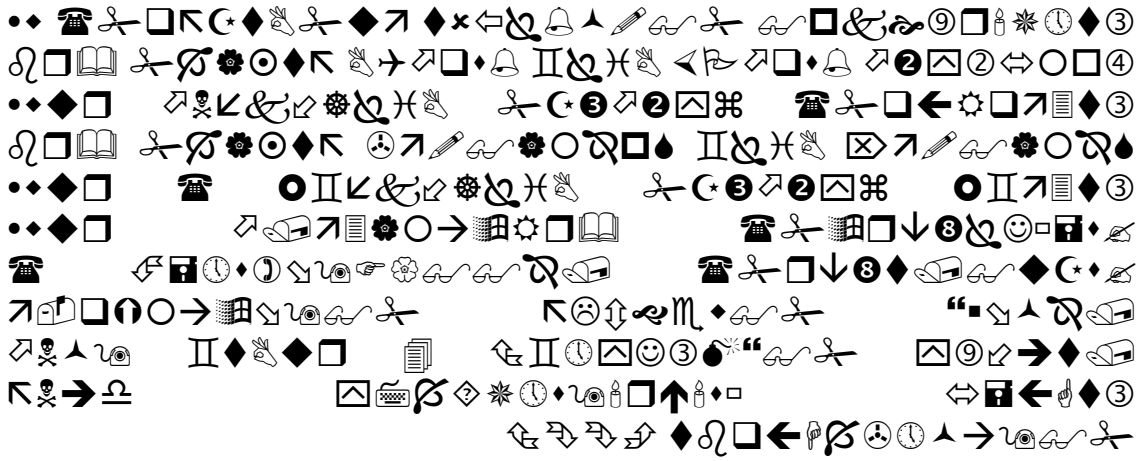

11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[74] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah

[73]Surat Kabar Mingguan *Nusa Putera* Edisi Sumsel, h. II.

[74]Jangan mencela dirimu sendiri maksudnya ialah mencela antara sesama mukmin karana orang-orang mukmin seperti satu tubuh (Tafsir dari Alquran Terjemah).

(panggilan) yang buruk sesudah iman[75] dan Barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Q.S Al- Isra: 37

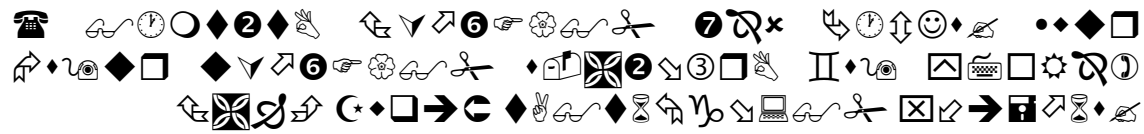

37. dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung.

Dari kedua ayat tersebut, sedikit banyaknya pembaca mengerti akan pesan yang tersirat dalam kandungan Alquran, bahwa kedua ayat tersebut menjelaskan tentang larangan kesombongan seorang manusia. Walaupun satu ayat saja, hal ini sangat bermakna dan berati besar untuk dakwah melalui tulisan. Biasanya, hal seperti ini berkelanjutan pada setiap terbitan *NP* edisi Sumsel. Selain mengutip kandungan Alquran sebagai sumber dalil yang utama, *NP* pada edisi terbitan sebelumnya juga mengutip hadist-hadist Sahih Bukhari dan Muslim. Kemudian, dalam kolom Mimbar Islam dengan judul "Dasar Pandangan Hidup Muslim", isinya secara tegas mendakwahkan tentang prinsip dan ideologi seorang muslim.[76]

Beberapa hal yang menunjukkan betapa kompleksnya isi dari SKM. *NP*, yaitu tidak hanya memuat berita-berita berat (*hard news*), artikel umum, dan artikel dakwah saja. Akan tetapi, juga menyediakan ruang untuk mimbar budaya yang disajikan sebagai wawasan kebudayaan masyarakat Kota Palembang, Kata-kata Mutiara, dan Puisi sebagai penghibur pembaca. Hal ini sering dimuat *NP* untuk mengimbangi berita-berita berat (*hard news*) dan artikel berbobot. Sehingga, dengan beberapa hal tersebut diharapkan pembaca terhibur dan tidak bosan dengan isi berita yang disajikan. Bagian ini merupakan salah satu fungsi pers, yaitu fungsi menghibur (*to entertain*).[77]

Dengan memuat artikel-artikel berorientasi dakwah Islamiyah tersebut, tidak berarti bahwa SKM. *NP* Edisi Sumsel melakukan penyimpangan fungsi daripada pers sebagaimana lazimnya. Akan tetapi, hal ini merupakan nilai plus dari beberapa fungsi

[75]Panggilan yang buruk ialah gelar yang tidak disukai oleh orang yang digelari, seperti panggilan kepada orang yang sudah beriman, dengan panggilan seperti: Hai fasik, Hai kafir dan sebagainya (Tafsir dari Alquran Terjemah)

[76]*Ibid.*, h. III.

[77]http://www.scribd.com/doc/71026851/Peranan-Pers-Dalam-Kehidupan-Masyarakat.

pers lainnya. Nilai plus tersebut ialah fungsinya sebagai media dakwah melalui tulisan-tulisan yang mengandung prinsip-prinsip dakwah dan pendidikan karakter dalam Islam. Hal ini merupakan tolok ukur SKM. *NP* Edisi Sumsel sebagai media massa yang mempunyai basis Islam.

Dukungan pers dalam bentuk penyajian berita, iklan, surat pembaca, maupun opini tentang sosial kemasyarakatan dan pendidikan mempunyai makna yang sangat signifikan bagi perkembangan lembaga-lembaga pemerintahan dan pendidikan Islam di Kota Palembang dan sekitarnya. Walaupun tidak setiap saat, informasi sosial dan pendidikan Islam cukup sering muncul dan dibaca oleh masyarakat muslim baik di kota maupun diwilayah perdesaan (sekitar Kota Palembang yang berlangganan melalui Kantor Pos Palembang). Dengan realitas semacam ini adalah sangat mungkin jika animo masyarakat terhadap pendidikan Islam yang semakian berkembang sedikit banyak juga dipengaruhi oleh apa yang mereka baca dari *NP* Edisi Sumsel. Beberapa madrasah, sekolah, dan bahkan Perguruan Tinggi/Akademi memang memanfaatkan surat kabar atau majalah sebagai media promosi, terutama dalam bentuk iklan yang mengajak masyarakat memasukkan anak-anaknya ke lembaga pendidikan yang mereka kelolah.

Begitulah lebih kurang gambaran peran dan kontribusi SKM. *Mimbar Masjarakat* atau *Nusa Putera* Edisi Sumsel dalam menjalankan tugasnya sebagai media massa beroreintasi dan berbazis Islam. Pada prinsipnya, sumbangsih dan peran yang dilakukan oleh *Nusa Putera* adalah amanah dari masyarakat Kota Palembang khususnya dan Sumatera Selatan umumnya. Harapan semua lapisan masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya, tidak lain hanyalah sebuah perubahan dan perkembangan sosial kemasyarakatan Kota Palembang dan sekitarnya dalam rezim Orde Baru ketika itu.

Simpulan

Pers dan organisasi pada masa pergerakan dan perjuangan kaum nasionalis dan agamis, bagaikan satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Karena, pers merupakan corong, kekuatan dan senjata bagi kaum nasionalis Indonesia dalam organisasinya, sebagai institusi sosial untuk memajukan, mensejahterakan, dan memerdekakan bangsanya di

satu sisi, serta menentang segala bentuk kesewenang-wenangan penguasa yang represif dan otoriter di sisi lainnya.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), yang didirikan di Yogyakarta pada 1947 M juga menjadikan pers sebagai corong organisasi. Salah bukti perjuangan HMI melalui media massanya adalah HMI Cabang Palembang. Pada tahun 1965 M, HMI Cabang Palembang berani menerbitkan media massanya berupa surat kabar mingguan yang diberi nama *Mimbar Masjarakat* sebagai alat juang dan perlawanan terhadap media massa Partai Komunis Indonesia (PKI). Perjuangan HMI dengan SKM. *Mimbar Masjarakat*-nya direalisasikan dalam perang ideologi melalui pemberitaannya dan peran SKM. *Mimbar Masjarakat* itu sendiri. SKM. *Mimbar Masjarakat* yang setelah tertekan dengan peraturan pemerintah Orde Baru hingga berganti nama menjadi *Nusa Putera* edisi Sumsel, tetap selaras dan seideologi dengan HMI dalam menjalankan perannya, meski pemiliknya berada di tangan Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Fungsinya sebagai sarana perjuangan, wahana informasi, komunikasi dan penyalur pendapat umum, dalam hal ini, wujud perjuangan *Nusa Putera* edisi Sumsel dilaksanakan dengan perannya yaitu: berperan sebagai media kontrol sosial dan politik, serta berperan dalam memajukan dan mengedepankan pendidikan umum dan agama di Kota Palembang khususnya, untuk mendidik moral dan etika generasi penerus bangsa.

Surat Kabar Mingguan *Mimbar Masjarakat* dan *Nusa Putera* edisi Sumatera Selatan (1965 M-1972 M), merupakan bukti sejarah pers Islam di Kota Palembang, dimana keberadaan dan sejarahnya tidak begitu diketahui masyarakat dan khalayak publik di kota yang terkenal dengan *pempek*-nya, dan kota tertua di Indonesia ini. Padahal, sepak terjang dan perjuangannya dalam membangun, mengembangkan, mensejahterakan, dan mendidik masyarakat Kota Palembang melalui perannya begitu urgen dan kompleks. Hal demikian merupakan ironi sejarah bagi pers Islam di Indonesia umumnya dan di Kota Palembang khususnya. Karena, sebagian besar wartawan, pemuda muslim, dan masyarakat kota ini sekarang menutup sebelah mata dengan pers Islam ini sendiri, yang mereka kenal hanya pers atau media massa pada umumnya. Terlebih lagi, sebagian besar mereka bahkan menganggap bahwa peranan pers Islam dalam kancah perubahan sosial dan politik di Palembang tidak begitu memberi kontribusi. Padahal, sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa sejarah dan

peran serta kontribusi *Mimbar Masjarakat* dan *Nusa Putera* Edisi Sumatera Selatan sangat signifikan dalam perubahan sosial masyarakat di Kota Palembang.

*Wallahu'alam bis*hawab!

REFERENSI

Buku atau Terbitan Lainnya

Ana Nadya Abrar. *Pers Indonesia: Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1992.

Angga Sukmara Christian Permadi. "Merasionalisasi Gagasan Kebangsaan Taufiq Kiemas". *Jurnal Skripsi,* No. 1, Vol. 1. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Ana Nadhya Abrar, *Pers Indonesia: Berjuang Menghadapi Perkembangan Masa,* h. 109. Dalam kutipannya tentang "Pers Daerah: Semakin Berkibar, semakin menyimpan masalah" yang pernah dimuat dalam Kedaulatan Rakyat di Yogyakarta, 2 Juli 1991.

Akhmad Zaini Abar. *Kisah Pers Indonesia 1966-1974*. Yogyakarta: LKIS, 1995.

Alex Sobur. “Peran Pers Islam dalam Upaya mendorong Proses Demokratisasi di Indonesia”. dalam *Majalah Mediator*, Vol. 5, No. 2, 2004, h. 246.

Ismail Sukardi. *Madrasah dan Pergolakan Sosial Politik di Palembang*.Semarang: Need Prees, 2010.

Kurnati Abdullah. *45 Tahun Mengabdi Kepada Pers 1965- 2010: Sebuah Autobiografi*. Palembang: Rachmat Abadi, 2010.

Nor Huda. “Wacana “Islamisme dan Komunisme: Melacak Genealogi Intelektual Hadji Mohammad Misbach (1876-1926)”. *Disertasi* (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Pramudya Ananta Toer. *Sang Pemula*. Jakarta: Hasta Mitra, 1985.

Surat Kabar Mingguan. *Nusa Putera* Edisi Sumsel. Palembang: No. 1 Th. Ke-3, Januari 1969 M.

Tim Penulis Kompas. *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.

Teofillus. “Proses Penentuan Headline Surat Kabar: Studi pada Harian Manado Post”. *Skripsi*. Manado: Fakultas Ilmu Sosial Univ. Negeri Manado, 2013.

Yuliandre Darwis. *Sejarah Perkembangan Pers Minangkabau (1859-1945)*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2013.

Website

Ayundayani Rosadi. “Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia Sampai Kemerdekaan,” artikel diakses pada 24 Desember 2013 pkul 19: 24 wib. dari *http://ayundayanirosadi.blogspot.com/ 2012/10 /perkembangan-sejarah-pers-di-indonesia*.

Hanibal Wijayanta, “Media Massa dan Perubahan Sosial”, dikutip dalam *http://pkspalembang.or.id/read/ 494 /media-massa-dan-perubahan-sosial/*, pada 28 Agustus 2014 pukul 21.38 wib.

Isnawijayani, “Media Lokal Merubah Kehidupan Masyarakat (Kajian di Kota Palembang)”, dikutip dalam *http://isnawijayani.wordpress.com/2013/05/14/media-lokal-merubah-kehidupan-masyarakat/*, pada 19 Agustus 2014 pukul 13.08 Wib

Pemelianna Pardede, dkk., “Analisis Isi Kepatuhan Terhadap Standar Jurnalistik dan Kode Etik Jurnalistik” dalam

http://kippas.wordpress.com/2011/10/03/profesionalisme-headline-surat-kabar-analisa, di akses pada 25 Agustus 2014, pukul 21.24 wib.

Tim Penulis PWI Cabang NTT., *Sekilas Sejarah Pers Indonesia*, dalam http: //pwintt.blogspot.com /2013/03/ *sekilas-sejarah-pers-indonesia*-2.html, diakses pada 31 Mei 2013 pukul 21:09 wib

http://id.wikipedia.org/wiki/Banyuasin_II,_Banyuasin.

http://www.scribd.com/doc/71026851/Peranan-Pers-Dalam-Kehidupan-Masyarakat.

Wawancara

Bastari Suan (Tokoh masyarakat dan Budayawan Kota Palembang), pada 26 Mei 2014.

H. Kurnati Abdullah (Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 17 Januari 2014.

Ahmad Soleh ((Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 12 Agustus 2014.

Usman Djakpar (Tokoh pers/ mantan wartawan Palembang tahun 1960-an), pada 9 Agustus 2014.

Wawancara dengan bapak Bastari Suan (Tokoh masyarakat dan Budayawan Palembang), pada 15 Agustus 2014.